

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini secara berturut-turut akan dijelaskan tentang hasil penelitian, pembahasan hasil penelitian, pengembangan model konsep dan implementasi model. Konteks bahasan mengacu pada kondisi objektif pembelajaran keterampilan fungsional, model konseptual pembelajaran keterampilan fungsional, dan efektivitas model pembelajaran keterampilan fungsional pendidikan kesetaraan.

A. Deskripsi Hasil Penelitian Pendahuluan

Sebagaimana dijelaskan pada bagian metodologi, penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Akan tetapi untuk memberikan informasi data yang lebih mendalam dan mendukung model konseptual yang dikembangkan, maka penelitian ini didukung pula oleh data-data kualitatif. Beberapa data hasil penelitian secara seksama dijelaskan mulai dari: 1) kondisi sumberdaya PKBM, 2) program-program yang dikembangkan, 3) sarana/prasarana yang dimiliki PKBM, 4) kondisi manajemen PKBM dan, 5) proses pembelajaran di PKBM. Kondisi real PKBM seperti dijelaskan tersebut diketahui melalui kegiatan studi pendahuluan (*preliminary study*). Studi pendahuluan ini penting dilakukan, karena hasilnya digunakan sebagai dasar konseptual dan empiris pengembangan model pembelajaran keterampilan fungsional pendidikan kesetaraan yang dianggap dapat meningkatkan kemandirian warga belajar. Penelitian ini dilakukan pada warga belajar pendidikan kesetaraan Program Paket B PKBM Al-Salaam dan PKBM Citra di

Kabupaten Purwakarata. Kondisi kedua PKBM tersebut akan dijelaskan pada bagian berikut:

1. PKBM Al-Salaam

a. Identitas dan Manajemen PKBM

PKBM Al-Salaam dikelola oleh Yayasan/LSM Pendidikan dan Sosial Salaamun, beralamat di Jalan Terusan Kapten Halim No. 153, Kampung Panday RT/RW 02/01, Desa Sawah Kulon, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat dengan akta notaris Azhar, SH.

PKBM Al-Salaam didukung oleh sumberdaya dan manajemen yang mampu membangun program-program yang sejalan dengan kebutuhan masyarakat akan pendidikan dan kebutuhan implementasi program-program pendidikan yang digulirkan pemerintah khususnya program pendidikan nonformal (PLS). Daya dukung sumberdaya manusia dan manajemen tersebut dibuktikan dengan perangkat pengelola yang didasari oleh kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia dan sumberdaya manajemen yang handal dan sesuai dengan kebutuhan pengembangan program-program PKBM Al-Salaam. Pada tabel berikut dijelaskan tentang kondisi pengelola PKBM Al-Salaam:

Tabel 4.1
Manajemen PKBM AL-Salam

1.	Pembina PKBM	Nama	Pekerjaan	Jabatan
		1. Ny. Sundariah	Wiraswasta	Ketua Yayasan
		2. Drs. Ujang Kusmana	PNS	Penilik Dikmas
		3. Eka Chandra, S.Ag.	PNS	Tenaga Lapangan Dikmas (TLD)
2.	Pengelola/ Pengurus PKBM			
	Jabatan	Nama	Pekerjaan	Pendidikan
	Ketua	<u>Ujang Kusmara</u>	Wiraswasta	SMA

	Sekretaris	<u>Eneng Kusmiati</u>	Wiraswasta	SMA
	Bendahara	<u>Siti Murdiah</u>	Wiraswasta	SMA

Sumber: PKBM Al-Salam 2008

b. Sarana dan Prasarana PKBM

Dalam rangka mengembangkan program-programnya PKBM Al-Salam selain didukung oleh manajemen dan sumberdaya manajemen yang handal, PKBM Al-Salaam juga didukung oleh sarana-prasarana memadai bagi terselenggaranya program-program pendidikan nonformal khususnya penyelenggaraan pendidikan kesetaraan Program Paket B. Sarana prasarana yang tersedia memberikan keleluasaan dalam pengembangan model penelitian yang menjadi fokus penelitian terutama bagi terselenggaranya model pembelajaran keterampilan fungsional pada pendidikan kesetaraan Program Paket B pada PKBM Al-Salam. Berikut ini dijelaskan kondisi sarana prasarana PKBM Al-Salaam dapat dicermati pada tabel berikut:

Tabel. 4.2
Sarana dan Prsarana PKBM

1	Sarana Layak Pakai Sarana Belajar/ Administrasi	Jenis Sarana	Jumlah	Keterangan
		Meja & Kursi Relajar	20 set	
		Meja & Kursi pengelola	1 set	
		Papan tulis	1 set	
		Lemari/rak buku	1 set	
		Mesin tik	1 set	
		Komputer	1 set	
		Telepon	1 set	
		Facsimile	0	
		Kalender	1 set	
2	Bahan Belajar	Pengetahuan Umum	20 judul	
		Keagamaan	10 judul	
		Keterampilan	10 judul	
		Kesehatan	3 judul	
		Olahraga	3 judul	
		Kesenian	3 judul	
		Modul KF	160 set	
		Modul Paket A	20 set	

		Modul Paket B	60 set	
		Modul Paket C	10 set	
	Sarana Keterampilan	Mesin Jahit	6 buah	
		Mesin Obras	4 buah	
		Mesin Juki	6 buah	
		Alat pertukangan	1 set	
		Alat pembuat kue	1 set	
		Peralatan bengkel:		
		Sepeda	1 set	
		Sepeda motor	1 set	
		Las/ karbit	1 set	
			Kolam Ikan/ Perikanan	6 kolam
		Lahan Pertanian	200 m ²	
3	Perincian Tempat/ Bangunan yang dimiliki	A. Bangunan yang tersedia: Ruang Sekretariat Ruang Belajar Ruang Praktek Ruang Belajar Merangkap Praktek Perpustakaan/ Taman Bacaan Asrama Warga Belajar Asrama Tutor/ NST	1 lokal 1 lokal 3 lokal 1 lokal 1 lokal 6 lokal 2 lokal 0	
		B. Fasilitas pendukung Toilet Mushola/ tempat ibadah Tempat Usaha Produksi /Keterampilam Asrama WB	1 1 3 1	

Sumber: PKBM Al-Salam 2008

c. Tenaga Pendidik dan Kependidikan PKBM

Salah satu komponen dasar dan standar dalam penyelenggaraan pendidikan kesetaraan, adalah tersedianya sumberdaya tenaga pendidik dan kependidikan non-formal. Sejalan dengan hal itu PKBM Al-Salam memiliki tenaga pendidik dan kependidikan yang cukup untuk menggulirkan pendidikan kesetaraan Program Paket B. Disamping itu pula kondisi sumberdaya tenaga pendidik (kualitas dan kuantitas tutor) yang dimiliki PKBM Al-Salam memberi dukungan kuat bagi pengembangan model dalam penelitian ini. Kualitas dan kuantitas tenaga tutor di PKBM Al-Salam dapat dilihat dari jumlah dan relevansi program yang dikembangkan, jumlah warga belajar yang dimiliki dengan jumlah dan kualitas tutor berdasar kepada latar belakang pendidikan formal dan

nonformal (pelatihan) sebagai tenaga pendidik yang telah diikutinya. Untuk melihat kondisi sumberdaya tenaga pendidik dan latar belakang pendidikan baik formal maupun non formal yang telah diikutinya dapat dicermati pada tabel berikut:

Tabel.4.3
Kondisi Tenaga Pendidik dan Kependidikan PKBM
Berdasar Tingkat Pendidikan

Program/Jenis Kegiatan	Tingkat Pendidikan				Jumlah
	SLTP	SLTA	Dipl.	S1	
Program PLS					
Keaksaraan Fungsional	1	3	2	3	9
Paket A setara SD	1	1	1	-	3
Paket B setara SLTP	-	2	-	4	6
Paket C setara SMU	-	-	-	6	6
PAUD	5	2	3	-	10
Beasiswa/magang	-	1	-	-	1
Kejar Usaha/keterampilan					
a. Menjahit	1	-	-	-	1
b. Tata Boga	-	2	-	-	2
c. Bengkel Motor/las karbit/cat duco	1	2	-	-	3
d. Pertanian kangkung darat	1	-	-	-	1
e. Peternakan kambing/ ayam kampung	1	1	-	-	2
f. Perikanan	1	1	-	2	4

Sumber: PKBM Al-Salam 2008

Beberapa kegiatan pendidikan nonformal dalam rangka meningkatkan kualitas tenaga pendidik PKBM Al-Salaam dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel.4.4
Kondisi Tenaga Pendidik dan Kependidikan PKBM
Berdasar Tingkat Pendidikan

No.	Jenis Pelatihan	Penyelenggara Pelatihan	Lama Pelatihan	Tahun	Tempat Pelatihan
1	Keaksaraan Fungsional	Disdik Provinsi	5 hari	2004	Purwakarta
2	Paket B	Disdik Provinsi	7 hari	2005	Bandung
3	Paket C	Disdik Provinsi	5 hari	2006	Bandung
4	Manajerial PKBM	Disdik Provinsi	7 hari	2005	Bandung
5	KUPP	Disdik Provinsi	6 hari	2004	Bandung
6	Koperasi	Dinas Koperasi Kab	5 hari	2004	Purwakarta

Sumber: PKBM Al-Salam 2008

d. Program-program PKBM Al-Salaam dan Potensi Lingkungan

Kualitas program yang dikembangkan PKBM, sangat bergantung pada kualitas sumberdaya manusia dan kualitas sarana/ prasarana yang dimiliki PKBM. Pemahaman utuh tentang program pendidikan nonformal oleh tenaga PKBM baik tenaga pendidik dan tenaga kependidikan juga pengelola PKBM menunjukkan suatu isyarat, bahwa keberhasilan program-program yang dikembangkan PKBM, didukung oleh komponen-komponen tersebut. Asumsi-asumsi itu memberikan landasan bagi keberhasilan program-program yang dikembangkan PKBM Al-Salaam dan PKBM lainnya. Kondisi real di lapangan tentang PKBM Al-Salaam sebagai subjek penelitian ini memberikan dasar yang kuat bagi pengembangan model keterampilan fungsional pada pendidikan kesetaraan Paket B dalam meningkatkan kemandirian warga belajar. Kekuatan model yang dikembangkan dalam penelitian ini secara prinsip di dasari oleh beberapa program pendidikan kesetaraan Paket B berbasis keterampilan fungsional yang di kembangkan PKBM Al-Salaam meliputi: 1) keterampilan menjahit, 2) tata boga, 3) otomotif, pertanian, 4) peternakan, dan 5) perikanan. Program-program keterampilan fungsional yang dikembangkan PKBM Al-Salaam dalam pengembangannya selain didukung oleh sumberdaya manusia dan sumberdaya manajemen PKBM, akan tetapi juga didukung oleh potensi lingkungan dimana PKBM itu berada. Beberapa potensi lingkungan yang menjadi dasar pengembangan keterampilan fungsional diantaranya adalah; 1) bahan baku produksi usaha, 2) sarana transportasi dan 3) daya dukung masyarakat (kebutuhan masyarakat) terhadap keterampilan yang dikembangkan. Pemahaman potensi sumberdaya manusia dan potensi lingkungan

pada PKBM Al-Salaam didasari oleh assessment yang dikembangkan pada studi pendahuluan penelitian ini.

Berikut ini secara rinci digambarkan beberapa program yang dikembangkan PKBM Al-Salaam:

Tabel. 4.5
Program yang Dikembangkan PKBM Al-Salaam

Program	Jumlah		Sumber Dana		
	Kelompok	Peserta	APBD	APBN	Lainnya
1. Program PLS					
Keaksaraan Fungsional	7	70	√	√	-
Paket A Setara SD	1	20	√	-	-
Paket B Setara SLTP	2	40	√	√	-
Paket C Setara SMA	2	40	-	-	Swadaya
PAUD	4	130	-	-	Swadaya
Basiswa/Magang	-	-	-	-	-
Kejar Usaha	2	20	-	-	Swadaya
Keterampilan :					
a. Menjahit	1	3	-	-	Swadaya
b. Tata Boga	-	-	-	-	-
c. Bengkel Motor/las karbit/cat duco	1	17	-	-	Swadaya
d. Pertanian kangkung darat	1	5	-	-	Swadaya
e. Peternakan kambing/ ayam kampung	-	-	-	-	-
f. Perikanan/budidaya ikan mas	2	30	-	-	Swadaya
2. Program Lainnya					
Koperasi	-	56	-	-	Swadaya

Sumber: PKBM Al-Salam 2008

e. Daya Dukung dan Kemitraan PKBM dalam Mengembangkan Hasil Program

Dunia usaha, dunia industri dan masyarakat merupakan lembaga ekonomi dan lembaga masyarakat yang dapat dijadikan mitra (kerjasama) dalam pengembangan hasil-hasil PKBM. Hal ini dilakukan terutama dalam membina (kontrol), mengelola, memasarkan produk-produk yang dihasilkan PKBM. Disamping itu pula kemitraan antara PKBM dengan pihak-pihak yang dimitrakan

(bermitra) dilakukan agar produksi yang dihasilkan betul-betul berkualitas dan dapat diterima (sesuai standar) serta dipasarkan secara baik sehingga PKBM mampu mengembangkan usahanya dalam skala yang lebih luas. Untuk kepentingan itulah kemitraan dalam pengembangan PKBM baik pemasaran produk keterampilan PKBM maupun lulusan PKBM dengan DUDI dan masyarakat sangatlah diperlukan.

Sejalan dengan hal itu PKBM Al-Salaam telah menjalin kemitraan dengan DUDI dan koperasi yang berada di lingkungan PKBM dan lembaga pemerintah khususnya Dinas Pendidikan. Hasil kemitraan dapat dilihat dari dukungan sarana/prasaran yang telah diterima dan dukungan pengembangan lanjutan program PKBM di masa mendatang. Beberapa sarana/prasarana yang telah diperoleh hasil kemitraan diantaranya adalah: sumbangan 6 mesin jahit, 4 mesin obras, Buku TBM, alat belajar, dan alat pertukangan.

f. Hasil Program PKBM Al-Salaam

Keberhasilan PKBM khususnya PKBM Al-Salaam dapat dilihat dari kualitas dan kuantitas lulusan. Kuantitas lulusan dapat digambarkan dari jumlah input dan jumlah output yang dihasilkan, sedangkan kualitas lulusan salah satunya dapat dilihat dari indikator terserapnya lulusan di dunia kerja (pasar kerja), disamping itu pula kualitas lulusan dapat ditelusuri dari bisa tidaknya lulusan secara mandiri mengembangkan berbagai kemampuan dan keterampilan yang diperolehnya selama belajar di PKBM. Variabel-variabel keberhasilan tersebut secara teoritik dijadikan standar dan tolok ukur keberhasilan program pendidikan kesetaraan di PKBM. Untuk kepentingan pengembangan model konsep dalam

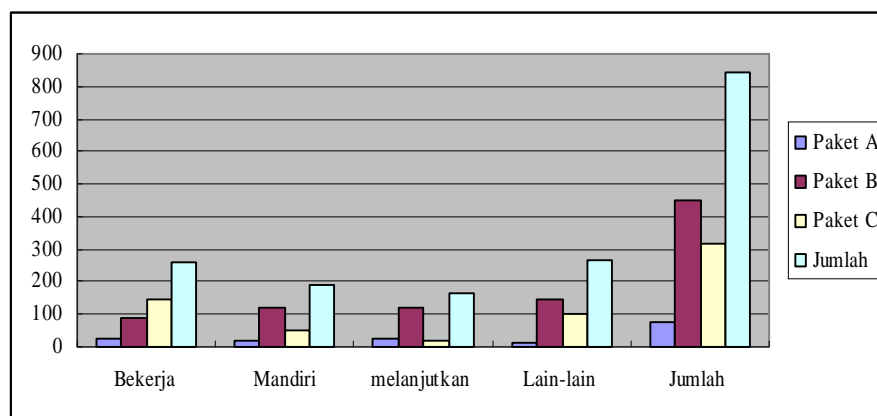
penelitian ini, maka variabel kemandirian warga belajar dijadikan sebagai tolak ukur keberhasilan program pendidikan kesetaraan berbasis keterampilan fungsional di PKBM. Berikut ini digambarkan tentang lulusan/tamatan program yang dihasilkan oleh PKBM Al-Salam sebagai berikut:

Tabel. 4.6
Lulusan PKBM Al-Salaam Beradasr Program

No.	Lulusan/ Tamatan Program	Telah Bekerja	Usaha Mandiri	Melanjutkan Pendidikan	Lainnya	Jumlah
1	Paket A	26	19	25	14	74
2	Paket B	89	122	120	146	447
3	Paket C	147	49	19	104	319

Sumber: PKBM Al-Salam 2008

Berdasar pada kondisi lulusan yang dihasilkan PKBM Al-Salaam, khususnya pada pendidikan kesetaraan program Paket B keterampilan fungsional, menjadi bukti, bahwa model konseptual yang akan dikembangkan penelitian ini sangat didukung data empirik. Karena kelemahan-kelemahan PKBM yang ada selama ini adalah tidak jelasnya lulusan yang dihasilkan, sehingga hal itu menyulitkan dalam pengembangan model yang dihasilkan. Perkembangan lulusan PKBM Al-Salaam dapat dilihat pada grafik berikut:



Gambar:1 Kondisi Lulusan Program Pendidikan Kesetaraan PKBM Al-Salaam

2. PKBM Citra

PKBM Citra didirikan pada tanggal 15 Juli tahun 2000 dengan persetujuan Yayasan Pendidikan Darul Hidayah. PKBM ini beralamat di Jalan Warungkondang RT/RW 12/03, Desa Sindangsari, Kecamatan Plered, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat.

Seperti halnya PKBM Al-Salaam, PKBM Citra didukung oleh sumberdaya dan manajemen yang mampu membangun program-program yang sejalan dengan kebutuhan masyarakat akan pendidikan dan kebutuhan akan implementasi program-program pendidikan yang digulirkan pemerintah untuk program pendidikan nonformal (PLS). Daya dukung sumberdaya manusia dan sumberdaya pengelolaan PKBM dapat dicermati dari perangkat pengelola yang berkualitas terutama dilihat dari latar belakang pendidikan. Kondisi itu sesuai dengan kebutuhan pengembangan program-program PKBM Citra. Pada tabel berikut dapat dilihat kondisi pengelola PKBM Citra:

Tabel. 4.6
Kondisi Pengelola PKBM Citra

No.	Nama	Pekerjaan	Jabatan	Keterangan
1	Drs. Suyud	PNS	Pembina	Camat Plered
2	Nasrun Hd	PNS	Pembina	KCD Kec. Plered
3	Ust. Abdullah	Pensiunan PNS	Pembina	Ketua Yayasan
4	Drs. Ubaidillah	Guru Bakti	Pengelola	S1
5	Ahmad Yaya T.	Guru Bakti	Pengelola	D3
6	Dra. Nining N.	Guru Bakti	Pengelola	S1

Sumber PKBM Citra tahun 2008

Untuk mendukung keberlangsungan program yang dikembangkan PKBM Citra berikut ini dijelaskan tentang kelengkapan administrasi yang dimiliki selama ini meliputi: a) Struktur organisasi, b) Rincian tugas pengelola/pengurus, c) Daftar

susunan pengurus/anggota, e) Rencana kerja/kegiatan, f) Papan nama PKBM, g) Laporan pelaksanaan kegiatan, h) Daftar hadir pengelola/pengurus, i) Daftar hadir tutor/pelatih, j) Daftar hadir warga belajar, k) Jadwal pembelajaran/pelatihan.

a. Sarana prasarana PKBM Citra

Implementasi program PKBM Citra didukung oleh sarana-prasarana yang sesuai dengan kebutuhan pengembangan program pendidikan nonformal, khususnya penyelenggaraan program pendidikan kesetaraan Paket B. Disamping itu pula sarana prasarana yang disediakan PKBM memberikan keleluasaan pengelola dan tenaga kependidikan dalam mengembangkan program-program yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan pendidikan masyarakat dimana PKBM itu dikembangkan. Beberapa sarana yang tersedia diantaranya adalah; Bangunan PKBM dengan seluas 7500 m² berdiri di atas tanah seluas 2500 m². Sarana layak pakai berupa sarana belajar yang dimiliki, antara lain meja dan kursi belajar 60 set, meja dan kursi pengelola 1 set, papan tulis 3 set, mesin tik 2 unit, juga dilengkapi kalender 2 set.

Bahan belajar berupa buku/modul yakni buku keterampilan sebanyak 15 judul, modul KF 20 set, modul Paket A sebanyak 45 set, modul paket B sebanyak 40 set, serta Paket C. Sarana keterampilan berupa mesin jahit sebanyak 4 buah, mesin obras 3 buah, dan alat pembuat kue 1 set. Perincian tempat/bangunan yang dimiliki berupa ruang sekretariat 1 lokal, ruang belajar 3 lokal, dan ruang belajar merangkap praktek 1 lokal. Fasilitas pendukungnya adalah toilet dan mushola.

a. Kondisi Sumberdaya Tenaga dan Program PKBM

Komponen utama dalam penyelenggaraan program pendidikan kesetaraan adalah tersedianya sumberdaya tenaga pendidik dan kependidikan. Sejalan dengan hal itu PKBM Citar memiliki tenaga pendidik dan kependidikan yang cukup untuk menggulirkan program pendidikan kesetaraan Paket B. Disamping itu pula kondisi sumberdaya manusia PKBM dilihat dari kualitas dan kuantitas tenaga pendidik dan kependidikan yang dimiliki PKBM Citra memberi dukungan kuat bagi pengembangan model dalam penelitian ini. Kualitas dan kuantitas tenaga tutor PKBM Citra dapat dilihat dari jumlah dan relevansi program yang dikembangkan, latar belakang pendidikan formal dan nonformal (pelatihan) yang telah diikuti, juga pekerjaan, dapat dicermati pada tabel berikut:

Tabel.4.7
Kondisi Tenaga Pendidik dan Kependidikan PKBM
Berdasar Tingkat Pendidikan

No.	Program/Jenis Kegiatan	Tingkat Pendidikan			
		SLTA	Diploma	S1	Jumlah
1	Program PLS				
	Keaksaraan Fungsional	2	1	2	5
	Paket A setara SD	1	1	-	2
	Paket B setara SLTP	1	1	5	7
	Paket C setara SMU	-	1	3	4
	Kejar Usaha	1	1	2	4
	Kursus	1	-	-	1
	Jumlah	6	5	12	23

Sumber: PKBM Citra 2008

Kualitas dan kuantitas tenaga pendidik dan kependidikan berdasar pada pekerjaan dan jenis program yang dikembangkan PKBM Citra diuraikan sebagai berikut:

Tabel.4.8
Kondisi Tenaga Pendidik dan Kependidikan PKBM Citra
Berdasar pekerjaan

No.	Program/Jenis Kegiatan	Tingkat Pendidikan				Jumlah
		Guru	TNI/Polri	Karyawan	Lainnya	
1	Mesin Jahit + obras	-	-	-	1	1
2	Paket A, KF	4	-	-	-	4
3	Paket B	4	1	-	-	5
4	Paket C	6	-	-	-	6
5	KBN (batu Bata)	1	-	3	-	4
	Jumlah	15	1	3	1	20

Sumber: PKBM Citra 2008

Mencermati tabel-tabel yang telah dijelaskan di atas membuktikan, bahwa PKBM Citra didukung oleh sumberdaya manusia, baik sumber daya pengelola maupun sumber daya tenaga pendidik dan kependidikan yang berpengalaman di bidang pendidikan. Jumlah dan kualitas sumberdaya yang dimiliki betul-betul datang dari lingkungan masyarakat dimana PKBM itu berada, kondisi itu menunjukkan indikasi, bahwa keberadaan PKBM betul-betul didukung oleh potensi dan sesuai dengan kebutuhan akan pendidikan khususnya kebutuhan pengetahuan dan keterampilan fungsional masyarakat.

Pemanfaatan dan kesesuaian tenaga pendidik (tutor/pelatih) dengan program-program yang dikembangkan PKBM Citra dapat dicermatai pada tabel di bawah ini:

Tabel.4.9
Program-Program Kegiatan PKBM Citra

Program	Jumlah				Sumber Dana		
	Peserta/usia	L	P	Jumlah	APBN	APBD	Lainnya
1. Program PLS							
Keaksaraan Fungsional	10-44 th	3	1	4	-	√	
	> 44 th	0	6	6			
	Jumlah	3	7	10			
Paket A Setara SD	7-12 th	2	4	6	√	-	
	13-15 th	0	3	3			
	> 15 th	6	8	14			

	Jumlah	8	15	23			
Paket B Setara SLTP	13-15 th	2	4	6	√	-	
	16-18 th	8	6	14			
	> 18 th	10	12	22			
	Jumlah	20	22	42			
Paket C Setara SMA	< 19 th	0	1	1	-	-	
	19-21 th	7	6	13			
	> 21 th	2	2	4			
	Jumlah	9	9	18			
Kejar Usaha	15-30 th	2	0	2	-	√	
	> 30 th	14	2	16			
	Jumlah	16	2	18			
Beasiswa/Magang	15-30 th			0	-	√	
	> 30 th			0			
	Jumlah			0			
PADU	0-3 th			0	-	√	
	4-6 th			0			
	Jumlah			0			

Sumber: PKBM Citra 2008

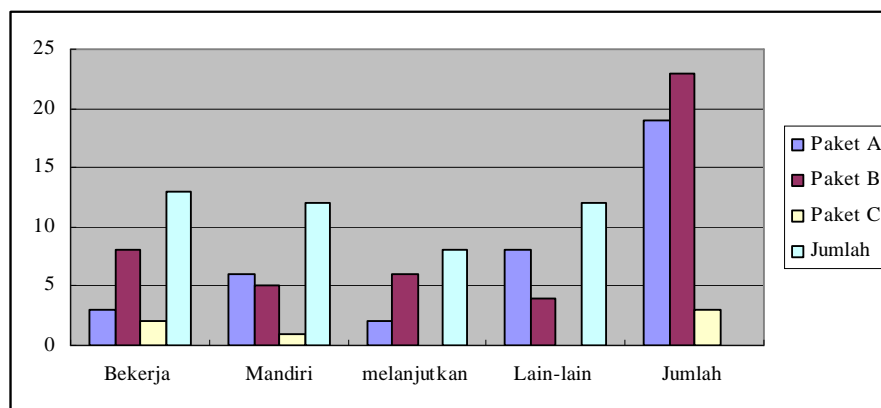
Berdasar kepada tabel kondisi sumberdaya tenaga pendidik dan program yang dikembangkan, menunjukkan bahwa, kualitas program yang ada dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Namun demikian kualitas dan keberhasilan program disamping dapat dicermati dari sisi akademik, namun perlu dilihat dari proses pembelajaran (pendidikan) dan juga keluaran. Kualitas keluaran (lulusan) bukan hanya dilihat dari jumlah lulusan yang lulus ujian nasional (UN), namun harus dilihat dari seberapa besar lulusan terserap oleh pasar kerja dan mampu mandiri (mampu mengembangkan kemampuan dan keterampilan yang dimilikinya secara mandiri), juga lulusan mampu melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi dalam hal ini program pendidikan kesetaraan Paket C.

Tabel.4.10
Keadaan Lulusan Program Pendidikan Kesetaraan PKBM Citra Berdasarkan Tahun

No.	Program	Tahun	Jumlah		Sumber Biaya
			Peserta	Lulusan	
1	Paket A	2000	20	20	APBN
2	Paket B	2000	35	35	APBN
3	Paket A	2001	20	20	APBN
4	Paket B	2001	40	40	APBN
5	Paket A	2002	20	20	APBN
6	Paket B	2002	40	40	APBN
7	Paket A	2003	20	20	APBN
8	Paket B	2003	42	42	APBN
9	Paket C	2004	18	18	Swadaya
10	Paket C	2004	7	7	Swadaya
Jumlah			262	262	

Sumber: PKBM Citra 2008

Perkembangan jumlah lulusan program-program pendidikan kesetaraan yang dikembangkan PKBM Citra yang mampu terserap pasar kerja, mandiri dalam mengembangkan keterampilan yang diperolehnya, atau mampu melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi sesuai program yang diikutinya dapat dicermati pada grafik berikut ini:



Gambar:2 Kondisi Lulusan Program Pendidikan Kesetaraan PKBM Citra

Beberapa unit usaha yang dikelola PKBM Citra dalam rangka mendukung kemampuan dan ketarampilan warga belajar, khususnya dalam mengelola dan dalam meningkatkan keterampilan serta mengembangkan kurikulum pembelajaran yang sesuai dengan keterampilan yang dikembangkan dalam pendidikan kesetaraan dapat dicermati pada table berikut:

Tabel.4.11
Unit Usaha yang Dikelola PKBM Citra

No.	Jenis Usaha	Jumlah		Sumber Modal	Jaringan Pemasaran
		Kelompok	Anggota		
1	Kue Moci	3	18	Swadaya	Plered dan sekitarnya
2	Bata Merah	1	6	APBD	Plered dan sekitarnya

Sumber: PKBM Citra 2008

Dalam rangka mengembangkan program-program PKBM yang sesuai dengan kebutuhan keterampilan warga belajar, manajemen PKBM selalu berusaha melakukan berbagai terobosan khususnya melihat berbagai potensi yang ada di lingkungan dan potensi masyarakat (social budaya) di mana PKBM itu berada. Seperti diketahui dari hasil penelitian awal diketahui, bahwa potensi lingkungan PKBM Citra berlokasi di daerah perindustrian dan perkampungan padat penghuni. Ketersediaan bahan baku produksi usaha, ketersediaan sarana/alat produksi, ketersediaan nara sumber teknis, ketersediaan peluang pasar, transportasi yang memadai, membuat peluang yang cukup bagus guna meningkatkan perkembangan mutu program PKBM. Selain memahami potensi dalam angka pengembangan kualitas PKBM, pengelola PKBM, juga mengembangkan kemitraan dengan pihak-pihak tertentu khususnya dunia usaha dan dunia industri, masyarakat, serta lembaga pemerintah. Berikut ini digambarkan beberapa bantuan yang diperoleh

PKBM Citra sebagai hasil kerjasama (kemitraan) dengan lembaga pemerintah khusus Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dapat dilihat pada table berikut:

Tabel.4.11
Hasil Kerjasama Kemitraan antara PKBM Citra dengan DISDIK Jabar

No.	Nama/Jenis Bantuan	Instansi/Lembaga Pemberi Bantuan	Tahun	Jumlah Bantuan	
				Barang/Jasa	Dana (Rp)
1	Buku P. Umum	Disdik Jabar	2002	6 Judul	
2	Mesin Jahit	Disdik Jabar	2003	2 unit	
3	Mesin Obras	Disdik Jabar	2003	3 unit	
4	Mixer	Disdik Jabar	2003	1 unit	
5	Kompor Gas	Disdik Jabar	2003	1 set	
6	Mesin Tik	Disdik Jabar	2002	2 unit	
7	Modul Paket A + B	Disdik Jabar	2003	65 set	

Sumber: PKBM Citra 2008

B. Deskripsi dan Analisis Model Faktual

Pada bagian pembahasan hasil penelitian deskriptif melalui preleminary research (penelitian pendahuluan), telah disajikan berbagai data pendukung bagi pengembangan model program pembelajaran pendidikan kesetaraan fungsional. Hal ini dilakukan untuk lebih mamahami kondisi objektif sasaran penelitian juga untuk memudahkan peneliti dalam mengkaji konsep model yang akan dikembangkan serta efektifitas dan efisiensi model yang diujicobakan. Untuk kepentingan itulah pada bagian ini dijelaskan model faktual (hasil penelitian pokok) sesuai dengan permasalahan yang telah dikemukakan dalam uraian Bab I, paparan hasil penelitian ini mengetengahkan tiga hal, yaitu: (1) kondisi objektif pelaksanaan pembelajaran keterampilan fungsional dalam pendidikan kesetaraan program Paket B, (2) model pembelajaran keterampilan fungsional yang dikembangkan pada program pendidikan kesetaraan Paket B, (3) efektifitas model pembelajaran keterampilan fungsional dalam meningkatkan kemandirian

warga belajar Pendidikan Kesetaraan Program Paket B. Secara terfokus hasil penelitian tersebut disajikan dalam uraian selanjutnya.

1. Kondisi Objektif Pelaksanaan Pembelajaran Keterampilan Fungsional dalam Pendidikan Kesetaraan Program Paket B pada PKBM di Kabupaten Purwakarta

Kondisi objektif pembelajaran pada pendidikan kesetaraan program Paket B subjek penelitian ini berdasar kepada satandar yang diberlakukan Pemerintah khususnya yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Satandar Nasional Pendidikan.

Kajian ini diarahkan pada upaya menggali faktor-faktor internal model faktual pembelajaran pada pendidikan kesetaraan di PKBM yang diasumsikan dapat mempengaruhi keberadaan dan kemandirian warga belajar dalam mengikuti program pembelajaran serta kemampuan tenaga pendidik/tutor dalam membangun program pembelajaran. Disamping itu pula dibahas tentang berbagai permasalahan yang terkait dengan penyelenggaraan pembelajaran yang berlangsung pada PKBM.

a. Partisipasi warga belajar dalam proses pembelajaran

Dalam pengembangan program PKBM (satuan pendidikan nonformal) khususnya program pendidikan kesetaraan fungsional, partisipasi dari seluruh komponen pembelajaran khususnya warga belajar baik dalam menyusun perencanaan pembelajaran maupun dalam pelaksanaan pembelajaran merupakan tolak ukur utama. Hal ini dimaksudkan dengan tujuan:

- 1) warga belajar memiliki rasa tanggungjawab terhadap program yang akan dikembangkan, terutama keberhasilan dan keberlangsungan program.

- 2) Keterlibatan warga belajar dalam penyusunan perencanaan program pembelajaran pendidikan kesetaraan fungsional Paket B merupakan sebuah proses awal dari terjadinya proses belajar.
- 3) Penulusuran dan analisis kebutuhan warga belajar akan secara dini ditemukan, sehingga memudahkan tutor dalam mengembangkan program pembelajaran terutama; materi pembelajaran, strategi dan metode pembelajaran serta model evaluasi pembelajaran yang akan dikembangkan serta keterampilan yang cocok dengan kebutuhan materi juga kebutuhan warga belajar.
- 4) Di samping itu pula keterlibatan warga belajar dalam perencanaan pembelajaran akan memudahkan tutor dalam menganalisis permasalahan-permasalahan yang akan ditimbulkan dan akan memudahkan dalam pemecahan masalah yang ditemukan baik dalam proses pembelajaran maupun dalam mengukur keberhasilan pembelajaran. Kriteria dasar yang harus dipenuhi warga belajar dalam partisipasinya dalam menyusun rencana program meliputi: a) kemampuan dasar dan keterampilan yang dimiliki, terutama memahami masalah diri dan lingkungannya, b) memiliki kemauan, c) dapat bekerjasama, dan d) terbuka terhadap pengembangan diri dan pengembangan program.

Kegiatan utama untuk membangun kondisi partisipasi warga belajar di PKBM dalam pengembangan dan proses pembelajaran pendidikan kesetaraan fungsional dilakukan melalui berbagai kegiatan yaitu:

a) Pendekatan awal

Pendekatan awal dilakukan oleh tutor kepada peserta didik (warga belajar), untuk lebih mengenal satu sama lain terutama, berbagai hal yang berkaitan dengan potensi-potensi (diri) yang ada di warga belajar. Disamping itu pula kegiatan ini dilakukan untuk menumbuhkan rasa percaya diri warga belajar dalam mengikuti pendidikan kesetaraan di PKBM (motivasi) mengingat heterogenitas warga belajar dilihat dari usia, latar belakang keluarga (ekonomi), jenis kelamin, dan latar belakang pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki dalam mendukung proses dan perencanaan pembelajaran.

Kegiatan pokok yang dilakukan bersama warga belajar pada tahapan ini meliputi:

- 1) Tutor bersama warga belajar saling berkenalan (saling memperkenalkan diri), hal ini dilakukan untuk membangun keakraban diantara masing-masing.
- 2) Melakukan identifikasi awal tentang warga belajar (kemampuan dan keterampilannya) melalui wawancara secara informal untuk mengetahui identitas diri, kemampuan yang dimiliki, jenis keterampilan yang dimiliki, kebutuhan, jenis kegiatan yang dilakukan diluar belajar di PKBM, asal tempat tinggal, dan kebiasaan dalam belajar.
- 3) Menyebarkan dan memetakan kemampuan dan keterampilan yang dimiliki warga belajar kepada tutor lain agar memudahkan dalam membuat topik-topik (tema-tema) pembelajaran.
- 4) Membina kepercayaan warga belajar, agar terus mengembangkan diri dan percaya kepada kemampuan dan keterampilan yang dimilikinya.

- 5) Membentuk kelompok belajar, sesuai dengan kemampuan dan keterampilan yang dimiliki dan kebutuhan masing-masing.

Hasil dari kegiatan ini adalah: 1) memberikan alternatif strategi pembelajaran sehingga partisipasi warga belajar dalam proses pembelajaran terjadi dengan sebaik-baiknya dan tanpa paksaan. 2) meningkatkan kepercayaan diri warga belajar, 3) mengikuti pembelajaran secara terus menerus (kontinu).

b) *Assessment warga belajar*

Assessment dilakukan untuk mengetahui pengetahuan, keterampilan, kebutuhan, keinginan dan motivasi yang sebenarnya ada dalam diri warga belajar. Assessment ini dilakukan ketika pertama kali warga belajar akan mengikuti pembelajaran. Selama kegiatan ini tutor memberikan motivasi dan meningkatkan intensitas komunikasi dengan warga belajar sehingga diperoleh kejelasan, bahwa warga belajar betul-betul akan mengikuti dengan sungguh-sungguh program pendidikan kesetaraan Paket B fungsional yang diselenggarakan PKBM. Materi proses assessment mencakup: 1) identifikasi masalah-masalah keikutsertaan dalam proses pembelajaran, 2) identifikasi berbagai potensi yang dimiliki warga belajar serta dihubungkan dengan kebutuhan nyata warga belajar dalam mengikuti proses pembelajaran, 3) latar belakang warga belajar di masyarakat dan di rumah, 4) kondisi lingkungan warga belajar di mana mereka tinggal dan bekerja bagi yang sudah bekerja, 5) riwayat pendidikan warga belajar, 6) kondisi kehidupan sehari-hari. Identifikasi ini dilakukan untuk membantu memecahkan persoalan-persoalan dalam proses pembelajaran dan strategi yang diterapkan terutam dalam memilih tema-tema yang cocok dengan materi pembelajaran yang akan dibangun

di PKBM. Hasil asesment dapat dijadikan acuan atau fundasi dalam menyusun rencana pembelajaran yang secara langsung berimbas pada penetapan strategi pembelajaran, metoda pembelajaran dan bahan ajar (sumber) belajar yang akan digunakan tutor dalam proses pembelajaran.

b. Program Pembelajaran dan Rencana Pembelajaran

a) *Program Pembelajaran*

Program pembelajaran yang dikembangkan di PKBM menggunakan kurikulum pendidikan kesetaraan Paket B (Pendidikan Dasar Kesetaraan) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional pendidikan.

- 1) *Struktur kurikulum*, yang merupakan pola susunan mata pelajaran program pendidikan kesetaraan Paket B terdiri atas berbagai mata pelajaran untuk mengembangkan kemampuan olahhati, olahpikir, olahrasa, olahraga dan olahkarya, termasuk muatan lokal, keyterampilan fungsional, dan pengembangan kepribadian profesional.
- 2) *Beban Belajar*, program pendidikan kesetaraan paket B dinyatakan dalam satuan kredit kompetensi (SKK) yang menunjukkan bobot kompetensi yang harus dicapai oleh warga belajar dalam mengikuti program pembelajaran baik melalui tatap muka, prlatek keterampilan, dan/ atau kegiatan mandiri.
- 3) *Kurikulum tingkat satuan kegiatan belajar (PKBM) dan silabus*, dikembangkan dan ditetapkan bersama antara Dinas Pendidikan Kabupaten Kota yang bertanggungjawab dibidang pendidikan nonformal serta sesuai dengan kewenangannya. Kedalaman kurikulum dituangkan dalam standar

kompetensi (SK) dan kompetensi dasar (KD) masing-masing mata pelajaran. Mata pelajaran IPTEK memiliki SK dan KD yang sama dengan pendidikan formal di PKBM, hal ini dipakai untuk kepentingan ujian penyetaraan tingkat nasional.

- 4) ***Kalender pendidikan***, kalender pendidikan nonformal khususnya PKBM disusun sesuai kebutuhan warga belajar di PKBM. Permulaan tahun ajaran sesuai dengan kalender pendidikan kesetaraan yang dikeluarkan Direktorat Pendidikan Kesetaraan Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal Depdiknas (awal tahun ajaran pada Bulan Juli). Warga belajar dapat mengikuti kegiatan pembelajaran sesuai dengan kesempatan masing-masing dengan memperhatikan beban belajar dan cara menempuhnya sesuai dengan aturan yang diberlakukan.

b) ***Rencana Pembelajaran***

Hasil assessment dijadikan dasar untuk perencanaan pembelajaran yang disampaikan di PKBM. Pihak yang terlibat dalam perencanaan pembelajaran adalah pengelola dan tutor, adapun warga belajar terbatas hanya menyampaikan beberapa informasi permasalahan yang dihadapi ketika dilakukan dialog serta beberapa pertanyaan yang disampaikan kepada mereka. Disamping itu warga belajar terlibat dalam penyusunan perencanaan pembelajaran hanya pada penyampaian permasalahan-permasalahan serta kebutuhan yang ingin dipelajarinya..

Komponen-komponen yang direncanakan meliputi berbagai hal yang berhubungan erat dengan pembelajaran seperti: materi pembelajaran, penjadwalan, serta tempat proses pembelajaran berlangsung. Disamping itu pula diamati

beberapa keterampilan fungsional yang sesuai dengan topik-topik materi pembelajaran. Dalam proses ini ada beberapa kekurangan yang teramati diantaranya adalah; kurang memperhatikan kebutuhan real warga belajar serta sumber belajar yang mendukung. Tujuan pembelajaran ditentukan langsung oleh pengelola dan tutor, dengan asumsi bahwa warga belajar sebagai sasaran pembelajaran pasif, sehingga keterlibatan dalam proses penyusunan rencana pembelajaran masih terbatas.

Warga belajar mengikuti pembelajaran di PKBM kebanyakan tidak didasarkan atas motivasi yang datang dari dalam dirinya (instrinsik) tetapi atas dasar motivasi dari luar (ekstrinsik) seperti; ajakan teman-temannya, ajakan pengelola dan tutor, disuruh orang tua dan perusahaan dimana warga belajar bekerja, juga dikarenakan adanya transport dari pengelola. Rekrutment tutor dilakukan atas dasar sukarela dan keikhlasan, tidak berdasar pada kompetensi. Dalam proses penyusunan rencana pembelajaran, diketahui bahwa proses belajar dilakukan tutor sesuai dengan waktu senggang yang dimiliki, disamping itu pula tutor menerima uang lelah (honor) sesuai dengan standar yang ditetapkan PKBM.

Rekrutmen warga belajar dilakukan dengan cara tutor/pengelola mendatangi rumah-rumah dan bekerjasama dengan pemerintah setempat RT/RW atau Kepala Dusun. Juga dilakukan oleh para warga belajar yang sudah mengikuti pendidikan di PKBM.

Pada tahap (awal) orientasi pembelajaran di PKBM, warga belajar pertama-tama dikenalkan peran dan fungsi PKBM di masyarakat khususnya dalam pembelajaran (visi, misi dan tujuan PKBM), dijelaskan pula berbagai aturan yang

harus dilaksanakan warga belajar, peran pengelola dan tutor dalam rangka proses pembelajaran. Beberapa kegiatan yang dilakukan dalam mendukung tahap orientasi diantaranya adalah: menyusun jadwal pembelajaran dan jadwal tambahan untuk keterampilan, membuat jadwal pembagian tugas kebersihan PKBM, menyusun kegiatan yang menyenangkan seperti permainan, olahraga dan kesenian. Kegiatan-kegiatan itu disusun berdasar kesepakatan antara tutor/pengelola dengan warga belajar.

Dalam tahap orientasi pembelajaran disusun pula pengorganisasian warga belajar dan pembentukan kelompok belajar, kegiatan ini dipimpin oleh warga belajar dan diarahkan oleh tutor.

c. Pelaksanaan Pembelajaran

Proses pembelajaran merupakan proses komunikasi antara tutor dan warga belajar melalui berbagai media dan metoda yang sesuai dengan materi ajar/pesan yang secara fungsional dibutuhkan warga belajar. Proses pembelajaran dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan sehingga terjadi perubahan sikap dan perilaku warga belajar. Dalam proses pembelajaran dilakukan pula pemberian motivasi agar warga belajar berpartisipasi secara aktif di dalamnya. Disamping pembelajaran dilakukan pula; bimbingan mental/spiritual, pelatihan keterampilan, bimbingan belajar, bimbingan cara hidup sehat, olahraga, kesenian, aoutbound, dan karyawisata.

Pelaksanaan pembelajaran dilaksanakan secara bervariasi oleh tutor yang dibantu oleh pengelola. Variasi pelaksanaan pembelajaran seringkali berubah-ubah (tidak konsisten dengan perencanaan semula) hal itu dapat dicermati dari

waktu, dan materi pembelajaran. Ketidak kosistenan pelaksanaan pembelajaran disebabkan oleh berbagai faktor diantaranya adalah; rendahnya motivasi warga belajar, tutor berhalangan hadir, tidak ada yang menjemput warga belajar ke tempat tinggal atau tempat pekerjaannya, kegiatan pembelajaran di PKBM terganggu oleh kegiatan-kegiatan di masyarakat.

PKBM dalam menyelenggarakan pembelajaran cenderung kaku dan kurang memperhatikan kebutuhan belajar warga belajar dan disesuaikan dengan potensi lokal (masyarakat) yang dapat didaya gunakan untuk mendukung keberhasilan pembelajaran. Proses pembelajaran bersifat *teacher centered* (tutor lebih dominan menyampaikan materi sedangkan warga belajar pasif). Hal tersebut diakibatkan oleh kreatifitas tutor yang rendah atau dalam proses belajar hanya menggunakan metode ceramah dan tanya jawab.

Proses pembelajaran untuk materi keterampilan dilakukan seadanya, seperti; tutor langsung menyuruh warga belajar untuk menyiapkan alat dan bahan yang tersedia, dan praktek dikerjakan sesuai petunjuk tutor tanpa disesuaikan dengan materi dan kebutuhan belajar. Tempat pelaksanaan pembelajaran pada umumnya menggunakan ruangan yang ada di PKBM, atau halaman PKBM, di mana tempat-tempat tersebut kurang mendukung proses pembelajaran baik yang intra maupun ekstra. Waktu pelaksanaan pembelajaran dilaksanakan sesuai kesepakatan antara tutor, pengelola dan warga belajar, namun dalam pelaksanaannya sering kali berubah-ubah karena berbagai alasan keterbatasan tutor dan bahan ajar. Dalam proses pembelajaran dilakukan pula kegiatan pembinaan, dimana kegiatan ini disesuaikan dengan komponen materi program

pembelajaran. Dengan harapan tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien.

Menurut keterangan pengelola PKBM, tujuan diselenggarakannya berbagai program di PKBM, (33,33%) didasarkan pada pemenuhan akan keanekaragaman minat warga belajar, (20,00%) pengelola menyatakan didasarkan kepada pemenuhan keanekaragaman kebutuhan warga belajar, (26,67%) pengelola menyatakan didasarkan pada keanekaragaman adat/kebiasaan masyarakat calon warga belajar, dan (20,00%) didasarkan kepada keanekaragaman tuntutan/kebutuhan pasar.

Waktu penyelenggaraan program pembelajaran di PKBM bervariasi. Menurut tutor PKBM, waktu pembelajaran pada umumnya merupakan hasil kesepakatan antara tutor dengan warga belajar (86,67%), diserahkan kepada tutor (6,67%), diserahkan kepada warga belajar (6,67%) dan disesuaikan dengan tempat (10%). Lamanya waktu pembelajaran per minggu pada PKBM, (73,33%) selama dua kali, dan (26,67%) selama satu kali. Sumber dana pembelajaran di PKBM belum berkembang, bersumber dari pemerintah (86,67%), Sisanya ada yang dari masyarakat, forum PKBM, dan warga belajar.

Metode pembelajaran yang sering digunakan di PKBM, menurut warga belajar adalah ceramah, tanya jawab, dan diskusi (80%). Metode praktek hanya sekitar 20%. Metode pembelajaran yang digunakan, menurut warga belajar di PKBM sesuai dengan kondisi warga belajar (93,33%), kurang sesuai dengan kondisi warga belajar (5,33%) dan tidak sesuai dengan kondisi warga belajar (1,33). Alat dan sumber pembelajaran yang digunakan di PKBM, pada umumnya

tutor memandang sangat menunjang kemampuan warga belajar (30,56%), kurang menunjang kemampuan warga belajar (66,67%) dan tidak menunjang kemampuan warga belajar (2,78%).

Menurut warga belajar PKBM, program pembelajaran disusun sesuai dengan kebutuhan warga belajar (54,67%), berdasarkan program pemerintah (38,67%), dan disusun sesuai dengan kemampuan tutor (6,67%).

d. Strategi pembelajaran

Seperti telah dijelaskan sebelumnya strategi pembelajaran yang diterapkan di PKBM adalah; pembelajaran partisipatif, diskusi kelompok, belajar mandiri dan lain-lain. Namun ada metoda lain yang dikembangkan di PKBM yakni tutor sebaya. Strategi pembelajaran ini dikembangkan karena keterbatasan PKBM dalam menyediakan tutor dan keterbatasan sumber belajar.

Dalam menyelenggarakan strategi pembelajaran ini diperlukan kesiapan dan kemampuan tutor dalam mengkoordinasikan berbagai pengalaman mengajar kepada anak, juga kemampuan tutor dalam memilih anak yang unggul di antara teman-temannya. Pembelajaran partisipatif tutor sebaya dilakukan pada siswa yang berada pada level (kelas) 4, 5 dan 6 atau kelas akhir pada pendidikan kesetaraan. Strategi pembelajaran ini dilakukan dengan cara tutor menyiapkan bahan/materi ajar yang cocok dan dapat dipecahkan atau didiskusikan warga belajar di PKBM dan dipimpin oleh temannya yang lebih pintar (unggul). Model pembelajaran partisipatif tutor sebaya dipadukan juga dengan strategi pembelajaran mandiri. Strategi pembelajaran ini memerlukan bahan ajar (modul) yang sudah sedemikian rupa disiapkan dengan berbagai bahan bacaan yang secara fungsional berkaitan dengan materi ajar dan masalah-masalah/kebutuhan belajar

yang harus dipecahkan warga belajar. Beberapa faktor yang menjadi perhatian tutor dalam mengembangkan strategi pembelajaran tutor sebaya di antaranya adalah:

- 1) Kegiatan Pembelajaran berpusat pada warga belajar
- 2) Kesesuaian kegiatan dan isi materi pembelajaran dengan sifat-sifat individualitas warga belajar.
- 3) Faktor keturunan dan kesesuaiannya dengan materi pembelajaran.
- 4) Kesesuaian materi pembelajaran dengan faktor lingkungan (environmental factor).
- 5) Kesesuaian materi pembelajaran dengan potensi diri warga belajar.
- 6) Kesesuaian materi pembelajaran dengan perkembangan kehidupan.
- 7) Kesesuaian makna dengan pengembangan materi pembelajaran.

Pendekatan pembelajaran lain yang digunakan dalam proses pembelajaran di PKBM adalah pendekatan partisipatif andragogis. Pendekatan ini dilakukan dalam rangka membantu menumbuhkan kerjasama dalam menemukan dan menggunakan hasil-hasil temuannya yang secara fungsional berkaitan dengan lingkungan masyarakat dimana warga belajar tinggal dan bekerja. Kondisi dan situasi pendidikan yang dibangun dapat merangsang pertumbuhan dan perkembangan warga belajar. Berikut digambarkan pendekatan partisipatif andragogis

Tabel 4.12
Prinsip pembelajaran Pasrtisipatif Andragogis

Prinsip pembelajaran	Orientasi
Kategori usia	Mendewasa
Konsep diri	Mengembangkan kemandirian peserta

	didik
pengalaman	Pengalaman yang lebih unik, dapat dijadikan sumber belajar dan lebih kaya
Kesiapan belajar	Diorientasikan pada peran dan fungsi warga belajar di masyarakat
Orientasi belajar	Segera menerapkan pengetahuan dalam permasalahan yang dihadapinya. Bergeser dari berpusat pada subjek ke berpusat lebih pada masalah

Disamping pendekatan pembelajaran partisipatif andragogis, juga dilakukan pendekatan pembelajaran berbasis lingkungan/kontekstual; pendekatan ini dilakukan agar proses pembelajaran secara fungsional relevan dan bermanfaat bagi warga belajar sesuai potensi dan kebutuhan lokal (lingkungan sekitar dimana mereka tinggal dan bekerja). Oleh karena itu pendekatan pembelajaran ini harus terkait dengan lingkungan di mana warga belajar hidup dan bekerja. Sehingga warga belajar merasakan, bahwa pengetahuan dan keterampilan yang dipelajarinya bermanfaat dan terkait langsung dengan kehidupan sehari-harinya.

e. Pembelajaran Keterampilan Fungsional

Secara ringkas, pelaksanaan proses pembelajaran keterampilan fungsional pada pendidikan kesetaraan program Paket B di PKBM wliayah Kabupaten Purwakarta dilihat dari unsur warga belajar, tutor, proses pembelajaran, tujuan pembelajaran, media belajar, kurikulum, alat evaluasi disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 4.13

**Pelaksanaan Proses Pembelajaran Keterampilan Fungsional
pada Pendidikan Kesetaraan Program Paket B pada PKBM
di Kabupaten Purwakarta**

Unsur	Kondisi Objektif
--------------	-------------------------

Warga Belajar	Warga belajar sebelumnya tidak mendapatkan pembelajaran secara konseptual tentang pendidikan kecakapan hidup, biasanya langsung luluh dengan praktek keterampilannya
	Kemampuan awal warga belajar dari konsep masih rendah
	Pengalaman warga belajar dalam bidang keterampilan berwirausaha belum tumbuh
	Minat dan kebutuhan belajar belum nampak
Tutor	Tutor belum memiliki pemahaman terhadap substansi materi pendidikan
	Cara mengajar tutor masih bersifat klasikal dan lebih dominan dalam setiap pelaksanaan pembelajaran
	Setiap pelaksanaan pembelajaran tutor belum terbiasa menyusun rencana pembelajaran, media belajar, dan alat evaluasi pembelajaran
Proses Pembelajaran	Proses pembelajaran lebih cenderung pada pendekatan instruksional dibandingkan pendekatan pribadi
	Lebih menekankan pada penuntasan penyampaian materi dan mengabaikan kebutuhan pribadi warga belajar
Tujuan Pembelajaran	Tujuan Pembelajaran pada tahap awal hanya mengacu pada kemampuan WB agar bisa lulus dalam ujian paket B dan mereka mempunyai ijazah
Media Belajar	Minimnya media pendukung pembelajaran yang disusun oleh tutor pada setiap proses pembelajaran
	Kurang memanfaatkan media lokal untuk mendukung proses belajar
Bahan Belajar	Belum adanya bahan belajar untuk mengembangkan watak dan karakter kemandirian serta sikap kewirausahaan yang disusun oleh pihak tutor/secara lokal ataupun nasional
	Bahan belajar yang dikembangkan masih bersifat konvensional
Kurikulum	Kemampuan tutor untuk menterjemahkan kurikulum dalam praktik pembelajaran masih sangat kurang dan beragam
	Kurikulum yang ada belum menyentuh pengembangan watak dan karakter kemandirian serta sikap kewirausahaan warga belajar sehingga lulusan program kurang memiliki kemandirian
Alat Evaluasi	Evaluasi yang telah disusun oleh Dinas dan lembaga terkait masih terbatas pada uji kemampuan penguasaan kompetensi akademik sehingga belum memberikan informasi tentang kemandirian warga belajar

f. Dana Belajar

Berdasarkan hasil wawancara dengan seluruh responden yang terkait dan mengerti tentang dana belajar yang dikelola atau yang digunakan di PKBM dan hasil pengolahan daftar isian, sumber dana belajar PKBM dapat diidentifikasi sebagai berikut: pemerintah, masyarakat, forum PKBM, Iuran warga Belajar, dan bantuan donator. Dari sumber-sumber dana tersebut, terbesar terbesar diperoleh dari pemerintah. Dana yang masuk dari berbagai sumber tersebut, dikelola oleh PKBM secara otonom, baik dalam pencarian maupun dalam penggunaannya

menjadi tanggung jawab PKBM. Setiap PKBM harus melaporkan dan mempertanggungjawabkannya kepada pemberi dana atau pihak lain yang dipandang perlu mendapat laporan. Pengelolaan dan penggunaan dana pada setiap PKBM bervariasi Hasil identifikasi pengeluaran dana oleh Pengelola PKBM dapat dideskripsikan sebagai berikut.

- 1) Sebanyak 6% pengelola menyatakan pengeluaran dalam satu tahun di bawah Rp 10.000.000;
- 2) Sebanyak 6% pengelola menyatakan antara Rp. 10.000.000 s/d Rp.12.500.000;
- 3) Sebanyak 13% pengelola menyatakan berkisar antara Rp.12.500.000 s/d Rp.15.000.000,
- 4) Sebanyak 6% menyatakan berkisar antara Rp.15.000.000 s/d 17.500.000;
- 5) Sebanyak 69% menyatakan di atas Rp. 20.000.000,-

Penggunaan dana tersebut diantaranya untuk transfot tutor, membeli bahan habis pakai, ATK, buku tulis, membayar rekening listrik dan telepon serta langgana koran. Bervariasinyan perolehan dan penggunaan dana dalam satu tahun disebabkan ketergantungan sumber dana yang diperoleh, karena terdapat PKBM yang di danai oleh APBN melalui dana Dekonsentrasi, dari APBD Provinsi Jawa Barat dan hanya mengandalkan dari swadaya masyarakat serta warga belajar. Walaupun dalam pengelolaan dana memiliki kebebasan, tetapi mereka harus membuat pembukuan keuangan dan melaporkan penggunaan uang tersebut kepada pihak penyandang dana dan pemilik PKBM. Bila PKBM tersebut milik sebuah yayasan maka mereka harus melaporkan keuangan tersebut kepada

yayasan, kepada pemerintah (dalam hal ini Dinas Pendidikan), kepada masyarakat atau kepada pihak lain yang terkait.

g. Sarana Belajar

Sebagaimana dipersyaratkan bahwa PKBM harus memiliki sarana belajar. Sarana belajar tersebut antara lain gedung sebagai tempat belajar, buku-buku sebagai bahan belajar, berbagai media pembelajaran, dan perpustakaan. Berdasarkan hasil pemantauan di beberapa daerah, masih banyak PKBM yang belum memiliki gedung tempat belajar sendiri. Banyak PKBM yang tempat belajarnya masih numpang di sekolah-sekolah dasar atau tempat lain yang mereka pinjam.

h. Evaluasi Hasil Belajar

Evaluasi hasil belajar, dilakukan untuk melihat pencapaian program yang diterapkan, memperjelas fokus, serta sebagai informasi timbal balik kepada pengelola/tutor dan warga belajar mengenai kemajuan yang telah dicapai. Hasil evaluasi dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk penetapan peningkatan intervensi, revisi atau terminasi. Instrumen evaluasi berupa rancangan program, instrumen test, case record, file perkembangan anak dan pedoman observasi, yang dipergunakan baik secara kontinu, maupun secara periodik bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan.

Penilaian dilakukan oleh pengelola dan tutor dan bersifat insidental tidak kontinu, ada juga evaluasi yang bersifat assesmen melalui pengumpulan informasi dari tutor, dan warga belajar. Kegiatan penilaian pada umumnya berkaitan dengan

kewajiban melihat perkembangan hasil belajar warga belajar dan laporan PKBM dalam menyelenggarakan program.

Hasil belajar dirumuskan dalam bentuk pengetahuan, keterampilan dan sikap. Dalam berbagai hal para pengelola PKBM juga mengenal istilah kompetensi. Semua aspek tersebut dievaluasi dengan berbagai cara, baik dengan cara tes maupun nontes, secara lisan, tulisan maupun perbuatan. Pelaksanaan evaluasi dilakukan melalui evaluasi sumatif dan formatif dan dilakukan secara terencana dan terprogram.

Hasil belajar yang berupa pengetahuan, dinilai melalui tes hasil belajar tertulis. Hasil belajar tersebut, oleh para responden (tutor, pengelola, dan penilik) dinilai berkualifikasi baik (61%), bahkan (23%) responden menyatakan sangat baik, serta (16%) responden menyatakan cukup baik. Evaluasi pembelajaran yang selama ini dilakukan, menurut warga belajar lebih menekankan kepada kemampuan warga belajar (68%), (19%) menyatakan lebih menekankan pada kurikulum dari pemerintsh, (11%) menekankan kebutuhan lingkungan, dan ternyata menurut warga belajar evaluasi yang dilakukan hanya bersifat formalitas (3%).

Walaupun bagaimana menurut responden warga belajar, hasil belajar yang diperoleh oleh mereka sesuai dengan kebutuhan dan tujuan mereka belajar mengikuti kegiatan (96%), dan hanya (4%) responden yang menyatakan kurang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan mereka. Dampak pembelajaran yang diperoleh, (69%) responden warga belajar berpendapat bahwa hasil belajar yang mereka peroleh dapat meningkatkan kemampuan dan keterampilan warga belajar .

2. Daya dukung

Menurut keterangan pengelola PKBM, tujuan diselenggarakannya berbagai program di PKBM, (33,33%) didasarkan pada pemenuhan akan keanekaragaman minat warga belajar, (20,00%) pengelola menyatakan didasarkan kepada pemenuhan keanekaragaman kebutuhan warga belajar, (26,67%) pengelola menyatakan didasarkan pada keanekaragaman adat/kebiasaan masyarakat calon warga belajar, dan (20,00%) didasarkan kepada keanekaragaman tuntutan/kebutuhan pasar.

Waktu penyelenggaraan program pembelajaran di PKBM bervariasi. Menurut tutor PKBM, waktu pembelajaran pada umumnya merupakan hasil kesepakatan antara tutor dengan warga belajar (86,67%), diserahkan kepada tutor (6,67%), diserahkan kepada warga belajar (6,67%) dan disesuaikan dengan tempat (10%). Lamanya waktu pembelajaran per minggu pada PKBM, (73,33%) selama dua kali, dan (26,67%) selama satu kali. Sumber dana pembelajaran di PKBM belum berkembang, bersumber dari pemerintah (86,67%), Sisanya ada yang dari masyarakat, forum PKBM, dan warga belajar.

Metode pembelajaran yang sering digunakan di PKBM, menurut warga belajar adalah ceramah, tanya jawab, dan diskusi (80%). Metode praktek hanya sekitar 20%. Metode pembelajaran yang digunakan, menurut warga belajar di PKBM sesuai dengan kondisi warga belajar (93,33%), kurang sesuai dengan kondisi warga belajar (5,33%) dan tidak sesuai dengan kondisi warga belajar (1,33). Alat dan sumber pembelajaran yang digunakan di PKBM, pada umumnya tutor memandang sangat menunjang kemampuan warga belajar (30,56%), kurang

menunjang kemampuan warga belajar (66,67%) dan tidak menunjang kemampuan warga belajar (2,78%).

Menurut warga belajar PKBM, program pembelajaran disusun sesuai dengan kebutuhan warga belajar (54,67%), berdasarkan program pemerintah (38,67%), dan disusun sesuai dengan kemampuan tutor (6,67%).

3. Kondisi Eksternal Penyelenggaraan PKBM

Faktor-faktor eksternal penyelenggaraan PKBM dalam penelitian ini diidentifikasi sebagai berikut.

a. Pembinaan

Pembinaan pada penyelenggaraan PKBM dilakukan oleh penilik dan Tenaga Lapangan Dikmas (TLD) dan dari unsur Dinas Pendidikan Kabupateu. Frekuensi pembinaan dalam satu tahun dapat dirinci sebagai berikut: 1 tahun sekali sebanyak 13%, menyatakan 2 kali dalam setahun sebanyak 20%, 3 kali dalam setahun sebanyak 13%, 4 kali dalam setahun sebanyak 40%, dan responden yang menyatakan lebih dari 4 kali sebanyak 13%. Teknik yang diberikan dalam proses pembinaan adalah bimbingan individual, bimbingan kelompok, dan dengan penggunaan media. Materi yang diberikan di PKBM secara keseluruhan mencakup materi: pengelolaan PKBM, pengelolaan pendidikan kesetaraan, keaksaraan fungsional, kewirausahaan, pendidikan anak usia dini, kursus dan pelatihan, keagamaan, pelayanan informasi.

b. Jaringan Informasi dan Kerja sama (Kemitraan) PKBM

Jenis Lembaga Mitra yang menjalin kerja sama dengan PKBM antara lain: Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Tenaga

Kerja, Kamar Dagang dan Industri (KADIN), Perbankan, Dunia Usaha/ Dunia Industri, BPKB, SKB, Tokoh Masyarakat dan perguruan tinggi dalam pembinaan dan penyelenggaraan PKBM. Selain jalinan kerja sama dengan instansi terkait di atas, penilik mengetahui adanya jalinan kemitraan antara PKBM dengan PKBM lainnya. Pihak yang terlibat sebagai mitra kerja dalam PKBM menurut pengelola adalah PKBM lain, dunia usaha atau industri, mass media, dan instansi pemerintah.

c. Dampak Program Pembelajaran

Dampak program pembelajaran PKBM dalam bentuk peluang kerja bagi warga belajar pada PKBM sebanyak 81%. Dampak program pembelajaran PKBM dalam bentuk peningkatan pendapatan warga belajar pada PKBM sebanyak 44%. Dampak pembelajaran yang diperoleh, pada umumnya warga belajar berpendapat dapat meningkatkan kemampuan dan keterampilan warga belajar (68,67%).

B. Model Konseptual Pembelajaran Keterampilan Fungsional

Model konseptual pembelajaran keterampilan fungsional untuk peningkatan kemandirian warga belajar Pendidikan Kesetaraan Program Paket B di PKBM Al-Salaam Kabupaten Purwakarta, dapat didekripsikan sebagai berikut.

1. Dasar Pemikiran

Program Paket B diperuntukkan bagi peserta didik yang berasal dari masyarakat yang kurang beruntung, tidak pernah sekolah, putus sekolah dan putus lanjut, serta usia produktif yang ingin meningkatkan pengetahuan dan kecakapan hidup, dan warga masyarakat lain yang memerlukan layanan khusus dalam

memenuhi kebutuhan hidupnya sebagai dampak dari perubahan peningkatan taraf hidup, ilmu pengetahuan dan teknologi.

Definisi mengenai setara adalah sepadan dalam *civil effect*, ukuran, pengaruh, fungsi dan kedudukan. Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 26 ayat (6) bahwa hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah atau pemerintah daerah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan. Oleh karena itu, pengertian mengenai Pendidikan Kesetaraan Program Paket B adalah jalur pendidikan nonformal dengan standar kompetensi lulusan yang sama dengan sekolah formal tingkat SMP/MTs, tetapi konten, konteks, metodologi, dan pendekatan untuk mencapai standar kompetensi lulusan tersebut lebih memberikan konsep-konsep terapan, tematik, induktif, yang terkait dengan permasalahan lingkungan dan melatih kecakapan hidup berorientasi kerja atau berusaha mandiri. Dengan demikian pada kompetensi lulusan Pendidikan Kesetaraan Program Paket B diberi catatan khusus pemilikan keterampilan untuk memenuhi tuntutan dunia kerja. Perbedaan ini disebabkan oleh kekhasan karakteristik peserta didik yang karena berbagai hal tidak mengikuti jalur formal karena memerlukan substansi praktikal yang relevan dengan kehidupan nyata.

Proses pembelajaran dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan yang lebih induktif, konstruktif, serta belajar mandiri melalui penekanan pada pengenalan permasalahan lingkungan serta pencarian solusi dengan pendekatan

antarkeilmuan yang tidak tersekat-sekat sehingga lebih relevan dengan kehidupan sehari-hari. Berkaitan dengan itu, sistem pembelajaran (*delivery system*) dirancang sedemikian rupa agar memiliki kekuatan tersendiri, untuk mengembangkan kecakapan komprehensif dan kompetitif yang berguna dalam peningkatan kemampuan belajar sepanjang hayat. Proses pembelajaran pendidikan program paket B lebih menitikberatkan pengenalan permasalahan lingkungan serta cara berpikir untuk memecahkannya melalui pendekatan antardisiplin ilmu yang relevan dengan permasalahan yang sedang dipecahkan. Penilaiannya lebih mengutamakan uji kompetensi.

Pengembangan model Pendidikan Keterampilan Fungsional untuk meningkatkan kemandirian warga belajar Pendidikan Kesetaraan Program Paket B dilandaskan atas aspek teretik konseptual, yuridis, dan empirik sehingga nantinya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan memiliki tingkat fisibilitas yang tinggi untuk diimplementasikan.

2. Landasan Konseptual

Landasan konseptual yang dijadikan rujukan dalam pengembangan model ini adalah konsep dasar kecakapan hidup (*life skills*) dan pendidikan untuk semua (*education for all*).

a. Kecakapan Hidup (*Life Skills*)

Berkenaan dengan kecakapan hidup, dikemukakan tentang: (1) konsep dasar, (2) posisi kecakapan hidup dalam pendidikan nonformal, (3) hubungan kehidupan nyata, kecakapan hidup, dan mata pelajaran, (4) jenis-jenis kecakapan hidup, dan (5) pengembangan *life skills* dalam pendidikan berbasis masyarakat.

1) Konsep Dasar

Banyak pengertian tentang pendidikan kecakapan hidup (*life skills*) yang dikemukakan oleh para pakar, maupun badan/lembaga yang memiliki otoritas di bidang pendidikan, pelatihan dan kesehatan. Antara lain menurut Broling (1989) “*life skills*” adalah interaksi berbagai pengetahuan dan kecakapan yang sangat penting dimiliki oleh seseorang sehingga mereka dapat hidup mandiri. Menurut Kent Davis (2000:1) Kecakapan hidup adalah “manual pribadi” bagi tubuh seseorang. Kecakapan ini membantu peserta didik belajar bagaimana memelihara tubuhnya, tumbuh menjadi dirinya, bekerja sama secara baik dengan orang lain, membuat keputusan yang logis, melindungi dirinya sendiri dan mencapai tujuan di dalam kehidupannya.

Makna kecakapan hidup (*life skills*), lebih luas dari keterampilan untuk bekerja. Orang yang tidak bekerja misalnya ibu rumah tangga, orang yang telah pensiun atau anak-anak tetap memerlukan kecakapan hidup. Sebagaimana orang yang bekerja, mereka juga menghadapi berbagai masalah yang harus dipecahkan. Orang yang sedang menempuh pendidikan pun memerlukan kecakapan hidup, karena mereka tentu memiliki permasalahan sendiri. Kecakapan hidup dipilih menjadi empat jenis, yakni:

- 1) Kecakapan personal (*personal skills*) yang mencakup kecakapan mengenal diri (*self awareness*), dan kecakapan berpikir rasional (*thinking skills*);
- 2) Kecakapan sosial (*social skills*);
- 3) Kecakapan akademik (*academic skills*);
- 4) Kecakapan vokasional (*vocational skills*).

Kecakapan mengenal diri pada dasarnya merupakan penghayatan diri sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, anggota masyarakat dan warga negara, serta menyadari dan mensyukuri kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, sekaligus menjadikan sebagai modal dalam meningkatkan dirinya sebagai individu yang bermanfaat bagi dirinya sendiri maupun lingkungannya. Kecakapan berpikir rasional mencakup: (1) kecakapan menggali dan menemukan informasi (*informating searching*), (2) kecakapan mengolah informasi dan mengambil keputusan (*informating processing and decision making skills*), serta (3) kecakapan memecahkan masalah secara kreatif (*creative problem solving skills*).

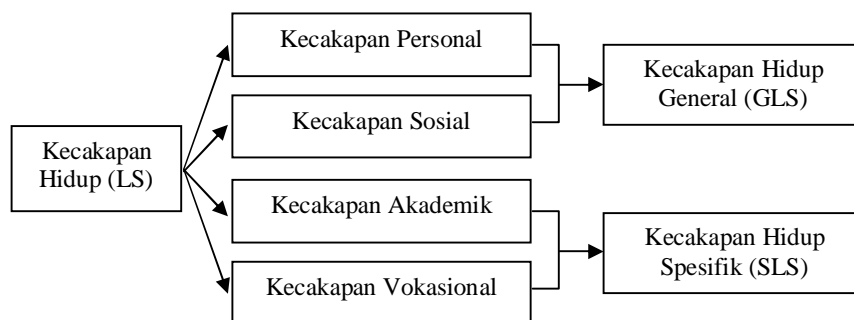
Kecakapan sosial atau kecakapan interpersonal (*interpersonal skills*) mencakup antara lain kecakapan komunikasi dengan empati (*communication skills*), dan kecakapan bekerja sama (*collaboration skills*). Empati, sikap penuh pengertian dan seni komunikasi dua arah, perlu ditekankan karena yang dimaksud berkomunikasi di sini bukan sekedar menyampaikan pesan, tetapi isi dan sampainya pesan disertai dengan kesan baik yang menumbuhkan hubungan harmonis.

Dua kecakapan hidup yang diuraikan di atas biasanya disebut sebagai kecakapan hidup bersifat umum atau kecakapan hidup general (*general life skills/GLS*). Kecakapan hidup tersebut diperlukan oleh siapa pun, baik mereka yang bekerja, mereka yang tidak bekerja dan mereka yang sedang menempuh pendidikan.

Bangsa Indonesia yang merupakan bagian integral dari masyarakat dunia yang memiliki sifat religius, kecakapan hidup yang bersifat umum (GLS) di atas

masih harus ditambah satu sebagai acuan, yakni akhlak. Artinya kesadaran diri, berpikir rasional, hubungan antarpersonal, kecakapan akademik serta kecakapan vokasional harus dijiwai oleh akhlak yang mulia. Akhlak harus menjadi kendali dari setiap tindakan orang. Karena itu, kesadaran diri sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa harus mampu mengembangkan akhlak yang mulia tersebut. Di sinilah pentingnya pembentukan jati diri dan kepribadian (*character building*) guna mengembangkan penghayatan nilai-nilai etika sosio-religius yang merupakan bagian integral dari pendidikan di semua jenis dan jenjang.

Kecakapan hidup yang bersifat spesifik (*specific life skills*) diperlukan seseorang untuk menghadapi problema bidang khusus tertentu. Untuk memecahkan masalah karena dagangannya yang tidak laku terjual, tentu diperlukan kecakapan pemasaran. Untuk mampu melakukan pengembangan biologi molekuler tentunya diperlukan keahlian di bidang bioteknologi. Secara skematik, kecakapan-kecakapan tersebut digambarkan pada gambar 4.1.



Gambar 4.1 Skema Kecakapan Hidup

Kecakapan hidup yang bersifat khusus biasanya disebut juga sebagai kompetensi teknis (*technical competencies*) yang terkait dengan materi mata

pelajaran atau mata diklat tertentu dan pendekatan pembelajaran lainnya. Sebagaimana disebut di depan *specific life skills* mencakup pengembangan akademik (kecakapan akademik) dan kecakapan vokasional yang terkait dengan pekerjaan tertentu.

Kecakapan akademik (*academic skills*) yang seringkali juga disebut kemampuan berpikir ilmiah pada dasarnya merupakan pengembangan dari kecakapan berpikir rasional pada GLS. Jika kecakapan berpikir rasional masih bersifat umum, kecakapan akademik lebih menjurus kepada kegiatan yang bersifat akademik/keilmuan. Kecakapan akademik mencakup antara lain kecakapan melakukan identifikasi variabel dan menjelaskannya pada suatu fenomena tertentu, merumuskan hipotesis terhadap suatu rangkaian kejadian, serta merancang dan melaksanakan penelitian untuk membuktikan suatu gagasan atau keingintahuan. Kecakapan vokasional (*vocational skills*) seringkali disebut dengan kecakapan kejuruan. Artinya kecakapan yang dikaitkan dengan bidang pekerjaan tertentu yang terdapat di masyarakat.

Perlu disadari bahwa dalam kehidupan alam nyata, antara *general life skills*(GLS) dan *specific life skills* (SLS) yaitu antara kecakapan mengenal diri, kecakapan berpikir rasional, kecakapan sosial, dan kecakapan akademik serta kecakapan vokasional tidak berfungsi secara terpisah-pisah atau tidak terpisah secara eksklusif. Hal yang terjadi adalah peleburan kecakapan-kecakapan tersebut, sehingga menyatu menjadi sebuah tindakan individu yang melibatkan aspek fisik, mental emosional dan intelektual. Derajat kualitas tindakan individu dalam

banyak hal dipengaruhi oleh kualitas kematangan berbagai aspek pendukung tersebut di atas.

Dalam menghadapi kehidupan di masyarakat juga akan selalu diperlukan GLS dan SLS yang sesuai dengan masalahnya. Untuk mengatasi masalah komputer yang rusak diperlukan *vocational skills* (bagian dari SLS), khususnya tentang komputer dan juga GLS, khususnya tentang berpikir rasional, menganalisis dan memecahkan masalah secara kreatif. Dengan kata lain, walaupun antara kecakapan-kecakapan hidup tersebut dapat dipilah, tetapi dalam penggunaannya akan selalu bersama-sama dan saling menunjang.

Pendeskripsian kecakapan hidup sebagaimana dijelaskan di atas, disebut pendeskripsian berdasarkan kompetensi. Di samping itu, masih ada beberapa pendeskripsian dari sudut pandang lain, misalnya dari segi fungsi yang memilahkan kecakapan hidup menjadi kecakapan dasar dan kecakapan instrumental.

Stein (2000: 17) mengemukakan bahwa terdapat empat kategori standar yang perlu dipersiapkan di masa datang tentang kecakapan bagi orang dewasa, yakni: (1) mendapatkan informasi dan ide-ide, (2) mengkomunikasikan dengan penuh percaya diri pesannya dan dapat dimengerti oleh orang lain, (3) membuat keputusan yang didasarkan pada informasi yang solid dan mampu menganalisis dan dapat menentukan secara hati-hati, (4) selalu belajar agar tidak ketinggalan.

2) Kecakapan Hidup dalam Pendidikan Nonformal

Dalam upaya peningkatan mutu dan relevansi pendidikan melalui luar sekolah yang berorientasi keterampilan hidup, ada beberapa program strategis

yang dapat dilakukan antara lain program kesetaraan plus keterampilan, yaitu dengan pendekatan *broad based education*, maksudnya memberikan bekal keterampilan sebagai antisipasi agar dapat dimanfaatkan oleh lulusan Paket A/B/C yang tidak melanjutkan pendidikannya untuk memasuki dunia kerja.

Pada kategori pengenalan wawasan kerja/bisnis, warga belajar diharapkan mengenal pola dunia kerja/bisnis. Sedangkan pada kategori pembekalan keterampilan hidup, warga belajar diharapkan dapat mulai mengikuti kegiatan praktek keterampilan pada pusat-pusat kerja yang telah mengadakan kerja sama dengan berbagai lembaga. Di samping itu, warga belajar diharapkan mampu menyelesaikan satu paket program secara utuh sampai pada tingkat kemahiran tertentu.

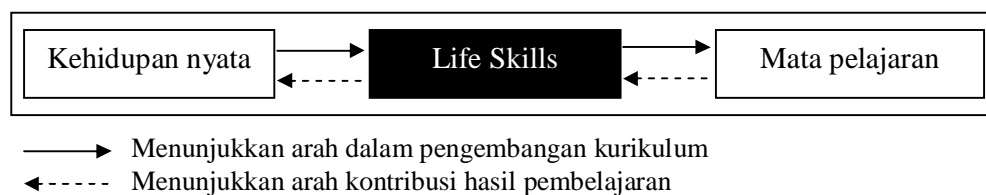
Pendayagunaan mata pelajaran muatan lokal dengan program pendidikan yang berorientasi kerja, di beberapa daerah telah memulai pada mata pelajaran muatan lokal yang menitikberatkan kompetensi yang dibutuhkan oleh pasar, misalnya di Bali yakni kemampuan berbahasa Inggris. Kegiatan seperti ini dapat dikembangkan di daerah lain, sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah.

Pelaksanaan keterampilan hidup yang diselenggarakan di sekolah dan di luar sekolah memiliki perbedaan konseptual. Persyaratan mendasar penetapan jenis keterampilan hidup pada jalur pendidikan luar sekolah meliputi: (1) keterampilan hidup dikembangkan berdasarkan minat dan kebutuhan individu dan/atau kelompok sasaran; (2) terkait dengan karakteristik potensi wilayah setempat, misalnya: sumber daya alam, ekonomi, pariwisata dan sosial budaya; (3) dapat dikembangkan secara nyata sebagai dasar penguatan sektor usaha kecil

atau *home industry*; (4) berorientasi kepada peningkatan kompetensi keterampilan untuk berusaha dan bekerja, sehingga tidak terlalu teoritik namun lebih bersifat aplikatif dan operasional; (5) jenis keterampilan ditetapkan oleh pengelola program bersama-sama dengan warga belajar, mitra kerja terkait, tokoh masyarakat, dan lainnya yang berhubungan dengan program keterampilan hidup.

3) Kehidupan Nyata, Kecakapan Hidup, dan Mata Pelajaran

Mungkin akan muncul pertanyaan, bagaimana hubungan antara kehidupan nyata, kecakapan hidup dengan mata pelajaran? Di sekolah dan di luar sekolah diajarkan berupa mata pelajaran/mata diklat, dan ujiannya berupa ujian mata pelajaran/mata diklat. Bukankah yang seharusnya diajarkan dan diujikan adalah tentang tema-tema kehidupan nyata?. Kaitan ketiga hal itu digambarkan sebagai berikut.



Gambar 4.2. Hubungan antara Kehidupan Nyata di Masyarakat, Pendidikan Kecakapan Hidup dan Mata Pelajaran

Gambar tersebut menunjukkan skema hubungan antara kehidupan nyata, kecakapan hidup dan mata pelajaran. Anak panah dengan garis putus-putus menunjukkan alur rekayasa kurikulum yang meliputi beberapa tahap.

Pada tahap awal, dilakukan identifikasi kecakapan hidup yang diperlukan untuk menghadapi kehidupan nyata di masyarakat. Kecakapan hidup yang teridentifikasi, kemudian diidentifikasi menjadi pengetahuan, keterampilan dan

sikap yang mendukung pembentukan kecakapan hidup tersebut. Tahap berikutnya diklasifikasikan dalam bentuk tema-tema/pokok bahasan/topik yang dikemas dalam bentuk mata pelajaran/mata diklat. Dari sisi pemberian bekal bagi peserta didik ditunjukkan dengan anak panah bergaris tegas, yaitu apa yang dipelajari pada setiap mata pelajaran/mata diklat diharapkan dapat membentuk kecakapan hidup yang nantinya diperlukan pada saat yang bersangkutan memasuki kehidupan nyata di masyarakat.

Dari pemahaman tersebut, sekali lagi mata pelajaran atau mata diklat adalah alat, sedangkan yang ingin dicapai adalah pembentukan kecakapan hidup. Kecakapan hidup itulah yang diperlukan pada saat seseorang memasuki kehidupan sebagai individu yang mandiri, anggota masyarakat dan warga negara. Kompetensi yang dicapai pada pelajaran/mata diklat hanyalah kompetensi antara untuk mewujudkan kemampuan nyata yang diinginkan, yaitu kecakapan hidup.

Sebagai contoh, mempelajari IPA bukan sekedar untuk pandai IPA, tetapi agar seseorang dapat memanfaatkannya dalam kehidupan sehari-hari, mengetahui peristiwa alam, menelaah mengapa peristiwa itu dapat terjadi, mempelajari ilmu lain yang terkait dengan peristiwa yang sedang terjadi dan sebagainya. Demikian pula dengan pelajaran bahasa yakni bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, bukan sekedar paham bahasanya, tetapi mampu dipergunakan untuk bernalar, mengungkapkan dan menyampaikan buah pikiran dalam bentuk komunikatif yang efektif. Begitu pula dengan mata pelajaran/mata diklat pendidikan kewarganegaraan, bukan sekedar untuk memahami prinsip dan aturan kewarganegaraan, tetapi lebih dari itu, yakni agar peserta didik mampu

menerapkan pengetahuannya untuk dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari.

Inovasi pendidikan di negara maju kini juga mengarah kepada pengembangan kecakapan hidup. Model pembelajaran terpadu (*integrated learning*) dan pembelajaran kontekstual (*contextual teaching and learning*) merupakan model pembelajaran yang mengarah kepada pengembangan kecakapan hidup. Model realistik (*realistic education*) yang kini sedang berkembang, juga merupakan upaya mengatur agar pendidikan sesuai dengan kebutuhan nyata peserta didik, agar hasilnya dapat diterapkan guna memecahkan dan mengatasi problema hidup yang dihadapi.

Pada model-model pembelajaran tersebut, mata pelajaran/mata diklat dipadukan atau dikaitkan satu dengan yang lain, agar sesuai dengan kehidupan nyata di masyarakat. Pembelajaran dikaitkan dengan konteks kehidupan peserta didik, agar memungkinkan mereka belajar menerapkan isi mata pelajaran/mata diklat dalam memecahkan problema yang dihadapi dalam kehidupan keseharian, walaupun dengan istilah berbeda dengan kecakapan hidup yang sedang dikembangkan di negara maju.

Perlu diperhatikan pula mengenai evaluasi hasil belajar. Pembelajaran yang berorientasi pada pembekalan kecakapan hidup dengan pembelajaran kontekstual memerlukan model evaluasi otentik, yakni evaluasi dalam bentuk perilaku peserta didik dalam menerapkan apa yang dipelajarinya (IPA, matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris atau lainnya) dalam kehidupan nyata. Paling tidak dalam bentuk evaluasi tersamar, yaitu dalam bentuk pemberian

tugas proyek/kegiatan untuk memecahkan masalah yang memang terjadi di masyarakat.

4) Jenis-jenis *Life Skills*

Dari sekian banyak pendapat tentang *life skills* dan pengelompokan jenis-jenisnya, beberapa pendapat penulis kutip sebagai berikut.

- a) Pendapat Broling (1989) dalam Pedoman Penyelenggaraan Program Kecakapan Hidup Pendidikan Non Formal mengelompokkan *life skills* menjadi tiga kelompok, yaitu: Kecakapan hidup sehari-hari (*daily living skill*), antara lain meliputi: pengelolaan kebutuhan pribadi, pengelolaan keuangan pribadi, pengelolaan rumah pribadi, kesadaran kesehatan, kesadaran keamanan, pengelolaan makanan-giri, pengelolaan pakaian, kesadaran pribadi sebagai warga negara, pengelolaan waktu luang, rekreasi, dan kesadaran lingkungan.
- b) Kecakapan hidup sosial/pribadi (*personal/social skill*), antara lain, meliputi: kesadaran diri (minat, bakat, sikap, kecakapan), percaya diri, komunikasi dengan orang lain, tenggang rasa dan kepedulian pada sesama, hubungan antar personal, pemahaman dan pemecahan masalah, menemukan dan mengembangkan kebiasaan positif, kemandirian dan kepemimpinan.
- c) Sedangkan yang termasuk dalam kecakapan hidup bekerja (*occupational skill*), meliputi: kecakapan memilih pekerjaan, perencanaan kerja, persiapan keterampilan kerja, latihan keterampilan, penguasaan kompetensi, menjalankan suatu profesi, kesadaran untuk menguasai berbagai keterampilan,

kemampuan menguasai dan menerapkan teknologi, merancang dan melaksanakan proses pekerjaan, dan menghasilkan produk barang dan jasa.

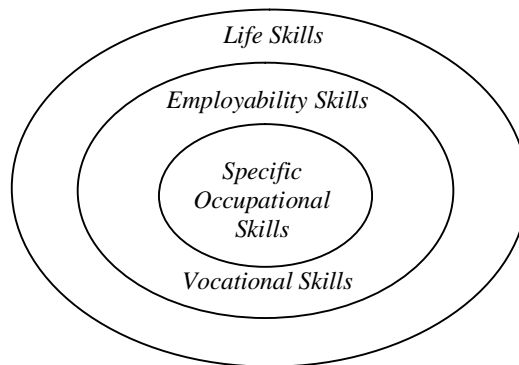
- d) *World Health Organization* (1997) memberikan pengertian bahwa kecakapan hidup adalah berbagai keterampilan/kemampuan untuk dapat beradaptasi dan berperilaku positif, yang memungkinkan seseorang mampu menghadapi berbagai tuntutan dan tantangan dalam hidupnya sehari-hari secara efektif. WHO mengelompokkan kecakapan hidup ke dalam lima kelompok, yaitu: (1) kecakapan mengenal diri (*self awareness*) atau kecakapan pribadi (*personal skill*), (2) kecakapan sosial (*social skill*), (3) kecakapan berpikir (*thinking skill*), (4) kecakapan akademik (*academic skill*), dan (5) kecakapan kejuruan (*vocational skill*).
- e) Direktorat Kepemudaan mengelompokkan *life skills* ke dalam tiga kelompok, yaitu kecakapan personal, kecakapan sosial, dan kecakapan vokasional. Secara skematis pengelompokkan tersebut adalah sebagai berikut.



Gambar 4.3 Skema Klasifikasi Pendidikan Kecakapan Hidup

- f) Satori (2002) mencoba menyajikan suatu model hubungan antara *life skills*, *employability skills*, *vocational skills*, dan *specific occupational skills*. Konsep *life skills* telah diuraikan di atas. Istilah *employability skills*, mengacu pada serangkaian keterampilan yang mendukung seseorang untuk menunaikan pekerjaannya supaya berhasil. *Employability skills* meliputi tiga keterampilan utama, yaitu: (1) Keterampilan Dasar yang mencakup Keterampilan berkomunikasi lisan, Membaca (mengerti dan dapat mengikuti alur berpikir), Penguasaan dasar-dasar berhitung, dan Keterampilan menulis; (2) Keterampilan berpikir tingkat tinggi yang meliputi Keterampilan pemecahan masalah, Keterampilan belajar, Keterampilan berpikir inovatif dan kreatif, dan Keterampilan membuat keputusan; dan (3) Karakter dan keterampilan afektif yang meliputi Tanggung jawab, Sikap positif terhadap pekerjaan, Hubungan antar pribadi dan kerja sama dan dalam tim, Percaya diri dan memiliki sikap positif terhadap diri sendiri, Penyesuaian diri dan fleksibel, Penuh antusias dan motivasi, Disiplin dan penguasaan diri, Berdandan dan berpenampilan menarik, Memiliki integritas pribadi, serta Mampu bekerja mandiri tanpa pengawasan orang lain. Lebih lanjut diungkapkan oleh Satori (2002) bahwa jika *Employability skills* dihubungkan dengan pekerjaan tertentu, maka dapat mengarah pada *vocational skills*, yang intinya terletak pada penguasaan *Specific Occupational Job*, yaitu keterampilan khusus untuk melakukan pekerjaan tertentu. Keterkaitan tersebut digambarkan dalam bentuk model

pada gambar 4.5. Gambar tersebut menunjukkan bahwa pengembangan *life skills* dalam konteks pendidikan formal (sekolah) selayaknya difokuskan pada penguasaan *specific occupational skills* (pekerjaan tertentu/spesifik). Program tersebut merupakan elaborasi yang dengan sendirinya dijiwai oleh pemaknaan *life skills*, *employability skills* dan *vocational skills*.



Gambar 4.4 Model Hubungan Fungsional Antara *Life Skills*, *Employability Skills*, *Vocational Skills*, dan *Specific Occupational Skills*

Jika dicermati dengan seksama, maka dapat dikatakan bahwa *life skills* dalam konteks kepemilikan *specific occupational skills* sesungguhnya diperlukan oleh setiap orang. Artinya pengembangan program *life skills* dalam dimensi tersebut sejatinya menyatu dengan program pendidikan yang melembaga (PF dan PNF). Pada konteks ini, maka konsep pendidikan di sekolah bahwa semua peserta didik yang dinyatakan telah menyelesaikan jenjang pendidikan tertentu seharusnya telah memiliki *life skill*. Dalam pendidikan formal di Indonesia, masalah tersebut sangat relevan jika dikaitkan dengan kelompok lulusan SLTP dan SMU yang tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Pengembangan program *life skills* pada jenjang

tersebut diharapkan dapat membantu mereka untuk meningkatkan harga diri dan kepercayaan diri dalam mencari nafkah dalam konteks peluang yang ada di lingkungan sosialnya (Satori, 2002). Dalam konteks pendidikan non-formal, khususnya bagi anak yang berada pada kelompok usia pendidikan dasar dan menengah yang tidak dapat mengikuti pendidikan formal karena berbagai alasan, seperti: letak pemukiman yang jauh dari sekolah, tingkat pendapatan keluarga yang tidak mampu membiayai pendidikannya, dan karena bencana alam/kerusuhan. Bagi mereka pendidikan alternatif pada jalur pendidikan non-formal sepatutnya lebih banyak memiliki muatan *life skills* khususnya *specific occupational skills* sesuai dengan kondisi lingkungan alam dan lingkungan sosial budayanya.

- g) Slameto (2002) membagi *life skills* menjadi dua bagian yaitu: kecakapan dasar dan kecakapan instrumental. *Life skills* yang bersifat dasar adalah kecakapan universal dan berlaku sepanjang zaman, tidak tergantung pada perubahan waktu dan ruang yang merupakan pondasi bagi peserta didik baik di jalur pendidikan persekolahan maupun pendidikan nonformal agar bisa mengembangkan keterampilan yang bersifat instrumental. *Life skills* yang bersifat instrumental adalah kecakapan yang bersifat relatif, kondisional, dan dapat berubah-ubah sesuai dengan perubahan ruang, waktu, situasi, dan harus diperbarui secara terus-menerus sesuai dengan derap perubahan. Mengingat perubahan kehidupan berlangsung secara terus-menerus, maka diperlukan keterampilan yang mutakhir, adaptif dan antisipatif. Dengan demikian prinsip belajar sepanjang hayat dan pendidikan seumur hidup diimplementasikan

melalui *life skills*, ini berarti tamatan satu jenis dan jenjang pendidikan baik pendidikan formal (PS) dan pendidikan nonformal (PLS), selain harus belajar sesuatu yang baru (*learning*), harus juga mampu melupakan pengalaman belajar masa lalu yang tidak lagi relevan dengan kehidupan saat ini (*unlearning*) dan selalu belajar kembali (*relearning*). Slameto selanjutnya membagi kecakapan dasar atas delapan kelompok, yaitu: Kecakapan belajar terus-menerus; Kecakapan membaca, menulis dan menghitung; Kecakapan berkomunikasi: lisan, tulisan, tergambar dan mendengar; Kecakapan berpikir; Kecakapan qalbu: iman (spiritual), rasa dan emosi; Kecakapan mengelola kesehatan badan; Kecakapan merumuskan keinginan dan upaya-upaya untuk mencapainya; Kecakapan berkeluarga dan sosial. Kecakapan instrumental, selanjutnya dibagi lagi menjadi sepuluh kecakapan, yaitu kecakapan: memanfaatkan teknologi dalam kehidupan; mengelola sumber daya; bekerja sama dengan orang lain; memanfaatkan informasi, menggunakan sistem dalam kehidupan; berwirausaha; kejuruan, termasuk olahraga dan seni; memilih, menyiapkan dan mengembangkan karir; menjaga harmoni dengan lingkungan; dan menyatukan bangsa berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

5) Life Skills dalam Pendidikan Berbasis Masyarakat

Paling tidak ada dua model pendekatan yang berkembang dan terjadi pada pengembangan *life skills* dalam pendidikan berbasis masyarakat. Model pertama dikemukakan oleh Marwah Dauh Ibrahim. Menurutnya *life skills* perlu didekati dengan upaya perenungan, pelatihan atau pembiasaan dan penelaahan kisah sukses. *Life skills* merupakan kombinasi antara: 1) *Perenungan* tentang hakikat

dan makna keberadaan kita sebagai manusia, makhluk tersempurna dari seluruh ciptaan Tuhan; 2) *Pelatihan dan pembiasaan* praktis untuk mengelola hidup dan merencanakan masa depan agar hidup lebih bermakna dan bermanfaat; 3) Cuplikan *kisah sukses* beberapa tokoh nasional dan tokoh dunia untuk menjadi sumber inspirasi dan motivasi.

Model kedua dikembangkan oleh Direktorat Kepemudaan, yang bercirikan bahwa pendidikan *life skills* didekati dengan empat hal, yaitu:

- 1) Keterampilan yang dikembangkan berdasarkan minat dan kebutuhan individu dan/atau kelompok sasaran.
- 2) Terkait dengan karakteristik potensi wilayah setempat (sumber daya alam dan potensi sosial budaya).
- 3) Dapat dikembangkan secara nyata sebagai dasar sektor usaha kecil atau industri rumah tangga.
- 4) Berorientasi kepada peningkatan kompetensi keterampilan untuk berusaha dan bekerja, sehingga tidak terlalu teoretik namun lebih bersifat aplikatif operasional.

Program Pendidikan Kecakapan Hidup dalam Pendidikan Luar Sekolah memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) Peserta didik berakar dari lapisan masyarakat miskin, tidak/putus sekolah, dan tidak/belum mempunyai keterampilan bekal hidup serta warga masyarakat lainnya yang tertarik meningkatkan kecakapan hidupnya.

- 2) Kurikulum pembelajaran bersifat fleksibel tergantung pada kebutuhan peserta didik, potensi pasar dan potensi usaha lainnya, termasuk dukungan masyarakat, pengusaha dan pemerintahan daerah.
- 3) Program berlangsung singkat paling lama satu tahun, tidak harus berjenjang dan berkesinambungan, yang penting peserta didik memperoleh manfaat bagi peningkatan mutu bekerja atau berusahnya.
- 4) Tutor, nara sumber, fasilitator terdiri dari orang-orang terampil dan peduli terhadap upaya pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat, dapat berasal dari pengusaha, aktivis sosial, perbankan, manajer perusahaan bisnis, tokoh masyarakat, kalangan pemerintahan dan lain-lain.
- 5) Metode pembelajaran bersifat dialogis, partisipatif-andragogis; ketiga bidang kecakapan hidup terintegrasi dalam proses pembelajaran.
- 6) Keberhasilan belajar diukur dari peningkatan kemampuan praktis dalam meningkatkan mutu pekerjaannya atau mutu kegiatan berusahnya sebagai akibat dari peningkatan pengetahuan dan keterampilan peserta didik terhadap materi belajar kecakapan hidup.

Program-program pendidikan kejuruan atau keterampilan yang telah diluncurkan kepada masyarakat pada umumnya telah mampu menghasilkan peserta didik yang terampil mengerjakan secara prosedural jenis keterampilan tertentu yang telah dipelajarinya. Tetapi setelah proses pembelajarannya selesai, sebagian besar peserta didik tidak dapat mempraktikkannya apalagi mengembangkan menjadi kegiatan usaha yang dapat dijadikan pegangan dalam memenuhi keperluan hidupnya.

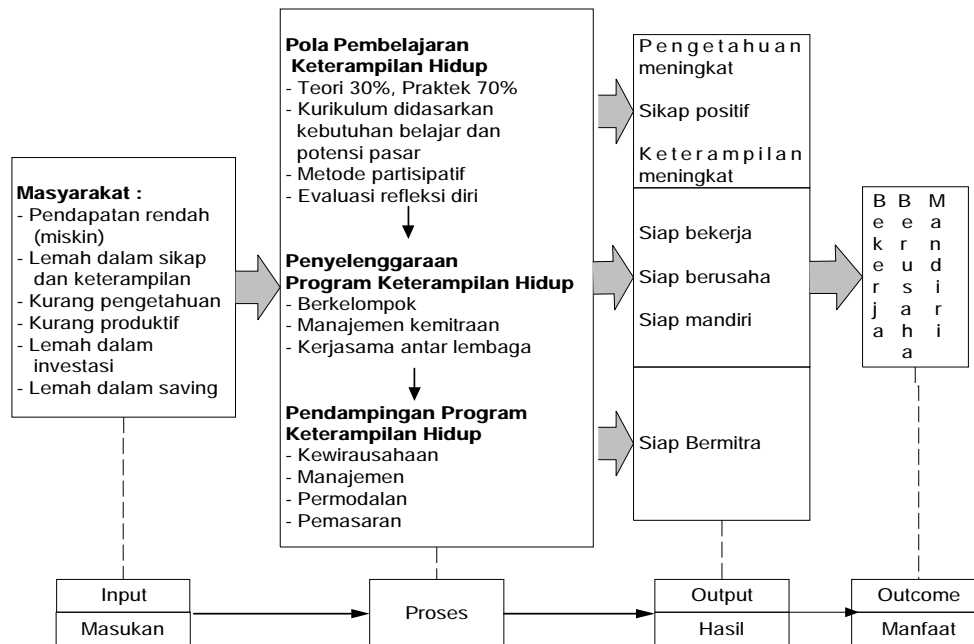
Berdasarkan pengalaman-pengalaman di atas, maka dalam melakukan program pendidikan kecakapan hidup perlu menggunakan pembelajaran dan pendampingan. Pembelajaran dimaksudkan sebagai wahana pemberian bekal awal kepada peserta didik, agar tumbuh dan berkembang kesiapan (mental) usahanya untuk mandiri, menguasai teknik keterampilan tertentu dan dasar-dasar pengelolaan usaha dalam rangka mengatasi permasalahan hidupnya.

Pendampingan dimaksudkan sebagai wahana pembimbingan dalam pemandirian peserta didik, melalui serangkaian kegiatan pemantauan, penilaian dan pembimbingan pemecahan masalah pengimplementasian hasil pembelajaran. Materi-materi pendampingan antara lain tentang pemasaran, permodalan, manajemen, mutu produksi/kualitas jasa. Secara umum pendampingan seyogyanya dimulai sejak peserta didik menyiapkan dirinya, melakukan identifikasi sampai dengan pengembangan kecakapan hidup yang dimilikinya. Secara skematis proses pembelajaran dilanjutkan pendampingan disajikan pada gambar halaman berikut.

b. Pendidikan untuk Semua (*Education for All, EFA*)

Dalam konteks pendidikan untuk semua (*education for all, EFA*), penyelenggaraan pendidikan dalam penuntasan wajar dikdas 9 tahun mengacu kepada prinsip EFA, salah satu strategi yang dikembangkannya adalah mendekatkan layanan pendidikan/sekolah dengan tempat peserta didik (*to bring school/classroom in to the children*), yang dari segi materi pengajaran, dikembangkan lagi menjadi *the school not the children* sekolah yang harus sensitif terhadap kebutuhan anak, (bukan) hanya anak yang dituntut untuk menyesuaikan dengan sekolah (lembaga pendidikan). Esensi *education for all*

(EFA) dalam konteks pendidikan dasar adalah menjamin bahwa menjelang tahun 2015 semua anak, khususnya anak perempuan, anak-anak dalam keadaan sulit dan mereka yang termasuk minoritas etnik, mempunyai akses dan menyelesaikan pendidikan dasar yang bebas dan wajib dengan kualitas baik.



Gambar 4.6 Skema Pembelajaran dan Pendampingan Program Pendidikan Kecakapan Hidup

1. Landasan Yuridis

Aspek yuridis merupakan landasan konstitusional, sebagai payung hukum dan kebijakan yang menjadi legalitas dan akuntabilitas pada tingkat implementasi model yang disusun. Beberapa landasan yang menjadi payung hukum model yang disusun adalah Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistran Pendidikan Nasional, Inpres Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Wajar Dikdas 9 tahun dan Pemberantasan Buta

Aksara, dan Permen Diknas Nomor 35 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Nasional Percepatan Wajar Dikdas 9 tahun dan Pemberantasan Buta Aksara.

2. Landasan Empirik

Temuan empirik, berdasarkan hasil penelitian tahap pendahuluan merupakan tahap awal untuk memperoleh data awal mengenai informasi atau data yang diperlukan dari masyarakat sekitar dan kelompok sasaran. Tahapan ini juga akan mengungkap secara mendalam informasi-informasi yang dibutuhkan dari berbagai sumber. Informasi-informasi yang diungkap pada tahap pendahuluan sebagai berikut:

- 1) Seleksi calon tutor pendidikan program paket B di PKBM Al-Salaam Kecamatan Pasawahan dan PKBM Citra Kecamatan Tegal Waru.
- 2) Kondisi pengelolaan dan proses pembelajaran di PKBM.
- 3) Pelatihan tutor dilaksanakan selama tiga hari bertempat di PKBM Al-Salaam Kecamatan Pasawahan.
- 4) Kolaborasi dengan tutor untuk melakukan pendataan calon warga belajar dan untuk melakukan pembelajaran dengan menggunakan kurikulum pembelajaran fungsional pendidikan program paket B.
- 5) Mengidentifikasi kebutuhan kelompok sasaran, kebutuhan belajar keterampilan, media belajar, sumber belajar dan hambatan yang mungkin timbul.
- 6) Mengidentifikasi faktor pendukung (lembaga, organisasi, mitra, paguyuban, SDM/SDA) pelaksanaan program pendidikan kesetaraan.

Hasil temuan empirik dijadikan bahan acuan dan pedoman untuk menyusun model konseptual yang didukung oleh studi pustaka. Model konseptual ini disusun ke dalam program pembelajaran keterampilan fungsional. Model konseptual pembelajaran fungsional program paket B digambarkan mulai dari konsep dasar sampai pada tahap operasional.

3. Tujuan Model Pembelajaran Keterampilan Fungsional

Secara umum, tujuan Model Pembelajaran Keterampilan Fungsional adalah untuk memberikan pendidikan setara SMP/MTs agar dapat memiliki pengetahuan akademik dan penguasaan keterampilan praktis yang dapat dijadikan bekal untuk bekerja dan berusaha. Sedangkan secara khusus, tujuannya adalah sebagai berikut.

- 1) Meningkatkan penguasaan keterampilan fungsional dan kepribadian profesional untuk memenuhi tuntutan dunia kerja.
- 2) Meningkatkan kemandirian psikologis warga belajar dalam aspek emosi, perilaku, dan nilai
- 3) Membangun kemandirian ekonomis warga belajar melalui pembinaan watak kewirausahaan.
- 4) Memberdayakan tenaga lokal yang potensial untuk mengelola sumber daya yang ada di lingkungannya.

4. Sasaran Program

Sasaran layanan pembelajaran Keterampilan Fungsional Program Paket B adalah anggota masyarakat Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta yang termasuk sasaran wajar dikdas 9 tahun, yakni anak-anak kelompok umur 13-15

tahun yang putus sekolah dan usia 15-45 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan formal setingkat SMP/MTs atau sederajat. Pemberian layanan program ini perlu menyesuaikan dengan karakteristik sasaran yang memerlukan layanan tersebut. Untuk tahap pengembangan model, Pembelajaran Keterampilan Fungsional pada Pendidikan Kesetaraan Program Paket B ini dilaksanakan di PKBM Al-Salaam yang ada di Kecamatan Pasawahan. Jumlah warga belajar yang menjadi kelompok sasaran pengembangan program ini adalah 48 orang.

Sementara itu, untuk kelompok kontrol dipilih PKBM yang setara dengan PKBM Al-Salaam, yaitu PKBM Citra yang berdomisili di Kecamatan Plered Kabupaten Purwakarta. Jumlah warga belajar yang menjadi kelompok kontrol dalam pengembangan program ini adalah 42 orang.

5. Kurikulum

Kurikulum Model Pembelajaran Keterampilan Fungsional pada Pendidikan Kesetaraan Program Paket B mencakup:

- a) Etika Bekerja
- b) Ekonomi Lokal
- c) Keterampilan Bermatapencarian
- d) Mental Kewirausahaan untuk membina karakter kemandirian psikologis dan sikap mental kewirausahaan.

6. Strategi Pembelajaran

Beban SKS untuk mata pelajaran praktik adalah dua kali mata pelajaran teori. Jadi setiap SKS bebannya adalah 80 menit untuk proses pembelajaran tatap muka, 30 menit untuk materi pengantar atau teorinya dan 50 menit praktiknya.

Penyampaian materi pengantar praktik selalu dilaksanakan sebelum kegiatan praktik. Materi pengantar itu di dalamnya mencakup ringkasan teori, peralatan praktik, dan prosedur kegiatan praktik.

Penyelenggaraan Model Pembelajaran Keterampilan Fungsional pada Pendidikan Kesetaraan Program Paket B dikembangkan dengan menggunakan dua strategi. *Pertama*, untuk materi yang bersifat pengantar dan konsep tentang Keterampilan Bermatapencapaian diajarkan dalam kelas sedangkan untuk kegiatan praktiknya langsung di lapangan atau bengkel kerja di bawah pengawasan langsung para tutor. *Kedua*, pelajaran Etika Bekerja, Ekonomi Lokal, dan Mental Kewirausahaan diajarkan di dalam kelas melalui *experiential learning*. Hanya mata pelajaran keterampilan yang esensial saja yang diberikan, sedangkan yang lainnya diharapkan dapat dipelajari oleh para warga belajar sendiri.

7. Tenaga Pendidik (tutor)

Tutor diangkat dari kalangan masyarakat di lingkungan warga belajar. Tutor terlebih dilatih agar memahami program pembelajaran keterampilan fungsional dan memiliki kemampuan dalam bidangnya. Pelatihan tutor diarahkan pada potensi lokal unggulan di lingkungannya. Tujuan pelatihan tutor yaitu agar pemahaman, pengetahuan dan keterampilan tutor sesuai dengan konsep dan setting penelitian. Tutor diharapkan memiliki persyaratan sebagai berikut.

- a) Paham akan metodologi dan strategi belajar
- b) Mampu menyusun rencana pembelajaran
- c) Memiliki motivasi untuk membelajarkan orang lain
- d) Letak geografis dekat dengan kelompok belajar

- e) Mengikuti pelatihan tutor.

Pelatihan tutor dilaksanakan dengan bantuan tim dari Jurusan Pendidikan Luar Sekolah, PKBM, SKB dan BP-PLSP. Selama proses pelatihan akan didampingi oleh peneliti. Desain pelatihan tutor untuk pendidikan kesetaraan dikemas berdasarkan potensi lokal unggulan masyarakat atau warga belajar telah disusun pada lampiran.

8. Metode Pembelajaran

Metode pembelajaran dalam program kesetaraan ini akan menggunakan metode pembelajaran partisipatif. Sedangkan teknik pembelajaran yang akan digunakan, antara lain:

- a) kelompok kecil,
- b) curah pendapat,
- c) diskusi kelompok,
- d) simulasi,
- e) permainan,
- f) demonstrasi,
- g) kerja kelompok dan praktek,
- h) *experiential learning*.

Teknik pembelajaran tersebut akan disusun pada satuan pembelajaran dimana harus luluh dengan materi pokok pelatihan pembelajaran keterampilan fungsional program paket B di PKBM Al-Salaam. Pada satuan pembelajaran dibuat skenario pembelajaran yang sesuai dengan potensi lokal yang dikemas dalam bahan belajar dan media belajar.

9. Bahan dan Sumber Belajar

Bahan belajar dapat berasal dari warga belajar sendiri, lingkungan dan pihak penyelenggara. Sumber dan bahan belajar yang digunakan antara lain:

- a) Buku,
- b) Gambar,
- c) Peta,
- d) Diagram,
- e) Alat simulasi hitung dan sumber lain.

Selain itu, bahan dan sumber belajar dapat pula dibuat dan dikembangkan bersama warga belajar. Sumber dan bahan belajar tersebut yaitu yang ditemukan dan ditentukan oleh warga belajar dengan memanfaatkan potensi lokal atau potensi alam yang ada di sekitar mereka.

10. Evaluasi Pembelajaran

Evaluasi dilakukan dengan menggunakan teknik portofolio selama program berjalan. Evaluasi dilakukan secara bertahap yang meliputi tes lisan dan tulisan baik uraian atau pilihan ganda, dan praktek. Tes ini dilakukan selama proses kegiatan belajar dengan harapan warga belajar lebih paham materi yang lekat dengan budaya mereka. Pada akhir program akan dilakukan tes kompetensi untuk mengukur kemampuan warga belajar selama proses pembelajaran. Lembar soal untuk tes kompetensi dapat lihat pada lampiran.

Selain itu, dalam model pembelajaran ini, pada awal semester dilakukan pengukuran kemandirian warga belajar sebagai pretest dan pada akhir semester juga dilakukan pengukuran ulang sebagai post test. Pengukuran kemandirian ini

dilakukan pada kelompok eksperimen maupun kelompok kontrol. Hasil pengukuran kemandirian ini dijadikan dasar dalam uji efektivitas model.

Secara keseluruhan, alur pengembangan Model Pembelajaran Keterampilan Fungsional pada Pendidikan Kesetaraan Program Paket B ini diilustrasikan dalam paradigma pengembangan model pada halaman berikut.

C. Efektivitas Model Pembelajaran Keterampilan Fungsional dalam Peningkatan Kemandirian Warga Belajar Program Paket B

Model konseptual yang disusun merupakan pengembangan pembelajaran fungsional dari teknis vokasional ke pembentukan *character building* dan sikap kewirausahaan. Dimana karakter dan sikap wirausaha akan diposisikan sesuai dengan kebutuhan dalam penyelenggaraan pembelajaran fungsional dalam pendidikan kesetaraan program Paket B. Masing-masing unsur yang dapat membentuk karakter dan sikap wirausaha dielaborasi kedalam kurikulum muatan local dikemas kepada mata pelajaran Etika Bekerja, Ekonomi Lokal, kecakapan hidup, dan keterampilan bermatapencarian serta keterampilan kerja. Setiap unsur dikembangkan kedalam bahan ajar dan media pembelajaran. Salah satu cara untuk kepentingan pengembangan pembelajaran fungsional yang efektif, efisien dan akuntabel diperlukan berbagai pendekatan. Di antara lain mengkaji kurikulum yang berlangsung selama ini, dan mengembangkan pembelajaran fungsional yang dikemas kedalam modul. Dengan mengkombinasikan beberapa mata pelajaran yang terkait dengan pembentukan karakter dan sikap wirausaha yang dapat dikuasai dan dipahami oleh warga belajar. Proses pembelajaran program Paket B lebih menitikberatkan pengenalan permasalahan lingkungan serta cara berpikir

untuk memecahkannya melalui pendekatan antar-disiplin ilmu yang relevan dengan permasalahan yang sedang dipecahkan.

Proses pembelajaran dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan yang lebih induktif, konstruktif, serta belajar mandiri melalui penekanan pada pengenalan permasalahan lingkungan serta pencarian solusi dengan pendekatan antar keilmuan yang tidak tersekat-sekat sehingga lebih relevan dengan kehidupan sehari-hari.

Berkaitan dengan itu, sistem pembelajaran (*delivery system*) dirancang sedemikian rupa agar memiliki kekuatan tersendiri, untuk mengembangkan kecakapan komprehensif dan kompetitif yang berguna dalam peningkatan kemampuan belajar sepanjang hayat. Proses pembelajaran dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan yang lebih induktif dan konstruktif. Dengan demikian pada kompetensi lulusan program Paket B diberi catatan khusus tentang pemilikan keterampilan untuk memenuhi tuntutan dunia kerja. Maka untuk pemenuhan tuntutan tersebut dipandang harus ada upaya pengembangan dalam proses pembelajaran yang mengarah kepada pembentukan karakter dan sikap berwirausaha. Di samping itu, juga untuk melaksanakan amanah Undang-Undang Sisdiknas yaitu yang terkait dengan substansi pembelajaran fungsional dalam pendidikan kesetaraan program Paket B.

Dalam pengembangan model pembelajaran keterampilan fungsional pada program Paket B, mengingat banyaknya variabel *intervening* terhadap program Paket B, maka dalam studi ini dibatasi pada tataran substansi profil pembelajaran keterampilan fungsional dalam pendidikan kesetaraan program Paket B, model

konseptual pengembangan keterampilan fungsional dalam pendidikan kesetaraan program Paket B, dan implementasi model keterampilan fungsional dalam pendidikan kesetaraan program Paket B di PKBM Al-Salaam Kecamatan Pasawahan dan PKBM Citra Kecamatan Plered Kabupaten Purwakarta. Untuk kepentingan kelompok eksperimen dan kontrol dalam implementasi program uji coba keseluruhan berjumlah 80 orang, yang tersebar di PKBM Al-Salaam sebanyak 48 orang dan di PKBM Citra sebanyak 42 orang warga belajar.

Jumlah sasaran warga belajar di PKBM Al-Salaam sebanyak 48 warga belajar yang terdiri atas laki-laki 26 orang dan perempuan berjumlah 22 orang sebagai kelompok eksperimen. Dalam kelompok ini sasaran diberi perlakuan selama 1 semester tentang muatan lokal keterampilan fungsional sebagai komplemen kurikulum pendidikan kesetaraan program Paket B dengan target dapat terbangun karakter dan sikap berwirausaha. Sedangkan di PKBM Citra berjumlah 42 orang terdiri atas laki-laki berjumlah 20 orang dan perempuan berjumlah 22 orang sebagai kelompok kontrol. Dilihat dari jumlah sasaran terdapat perbedaan namun masih dalam batas toleransi, tapi berdasarkan karakteristik usia relatif homogen. Namun dilihat dari kondisi ekonomi para orang tua termasuk dalam kategori rata-rata miskin.

Untuk menguji efektivitas model, digunakan desain *quasi eksperimen* yang mempunyai kelompok kontrol, walaupun tidak dapat berfungsi sepenuhnya untuk mengontrol variabel-variabel luar yang mempengaruhi pelaksanaan eksperimen. Memang kesulitan untuk membuat *equal* antara kelompok eksperimen dengan kelompok kontrol karena menyangkut perilaku manusia yang

selalu dinamis sehingga sulit untuk dimanipulasi secara ketat. Strategi pengembangan yang digunakan dalam studi ini adalah *cross-sectional growth studies*. Dimana dilakukan terhadap dua kelompok yaitu kelompok kontrol dan kelompok eksperimen dari sampel dalam waktu yang bersamaan. Untuk kepentingan kelompok eksperimen di bawah ini adalah aspek yang dikembangkan dari program pendidikan kesetaraan yang selama ini ada kedalam muatan program pendidikan keterampilan fungsional sebagaimana tampak dalam tabel berikut.

Tabel 4.14
Aspek Pengembangan Model Pembelajaran Keterampilan Fungsional Pendidikan Kesetaraan Program Paket B

No	Program Paket B	Kondisi Awal	Kebutuhan Belajar Berdasarkan Analisis Keterampilan Fungsional	Aspek Pengembangan
1	Warga Belajar	Warga belajar sebelumnya tidak mendapatkan pembelajaran secara konseptual tentang pendidikan kecakapan hidup, biasanya langsung luluh dengan praktek keterampilannya	Warga belajar lebih memilih atau harus didahului oleh pembelajaran secara konseptual tentang kewirausahaan dan keterampilan fungsional	Warga belajar mempelajari konsep pendidikan kecakapan hidup, kemandirian, dan materi kewirausahaan selama satu semester
		Kemampuan awal warga belajar dari konsep masih rendah	Warga belajar sudah mengetahui jenis-jenis keterampilan yang dikembangkan di masing-masing PKBM, namun biasanya mereka langsung terjun praktek	Perlu disusun bahan ajar yang bisa membangun karakter dan sikap kemandirian warga belajar secara akademik
		Pengalaman warga belajar dalam bidang keterampilan berwirausaha belum tumbuh	Warga belajar sudah mengetahui bahwa di lingkungannya banyak potensi lokal yang bisa dikembangkan	Bahan belajar harus disusun dan disesuaikan dengan potensi lingkungan warga belajar
		Minat dan kebutuhan belajar belum nampak	Warga belajar membutuhkan materi yang bersifat konseptual guna mendukung praktek keterampilan yang diminatinya.	Perlu adanya pengembangan aspek pembelajaran yang bersifat konseptual dengan mengacu pada

No	Program Paket B	Kondisi Awal	Kebutuhan Belajar Berdasarkan Analisis Keterampilan Fungsional	Aspek Pengembangan
				standar yang baku
2	Tutor	Tutor belum memiliki pemahaman terhadap substansi materi pendidikan	Tutor masih menganggap bahwa materi belajar yang disampaikan hanya disesuaikan dengan pengalaman dan kemampuan yang dimiliki tutor saja, mereka belum mengaitkan kebutuhan warga belajar dalam proses pembelajaran	Pada tahap awal diberikan orientasi tentang pelaksanaan pembelajaran yang disesuaikan dengan berbagai aspek keterampilan fungsional yang sudah dikenal oleh warga belajar.
		Cara mengajar tutor masih bersifat klasikal dan lebih dominan dalam setiap pelaksanaan pembelajaran	Aspek pengembangan watak dan karakter kemandirian serta sikap kewirausahaan dalam pembelajaran oleh tutor belum begitu nampak, mereka hanya mengajarkan materi pokok yang digariskan dalam kurikulum	Tutor secara bersama-sama menganalisis materi yang mendukung pengembangan watak dan karakter kemandirian serta sikap kewirausahaan warga pelajar dalam pembelajaran
		Setiap pelaksanaan pembelajaran tutor belum terbiasa menyusun rencana pembelajaran, media belajar, dan alat evaluasi pembelajaran	Rencana Pembelajaran, media belajar dan alat evaluasi perlu mendapat penekanan pada pengembangan watak dan karakter kemandirian serta sikap kewirausahaan	Adaptasi SKK terhadap materi belajar yang sesuai dengan pengembangan watak dan karakter kemandirian serta sikap kewirausahaan
3	Proses Pembelajaran	Proses pembelajaran lebih cenderung pada pendekatan instruksional dibandingkan pendekatan pribadi	Pendekatan pembelajaran harus lebih menekankan pada pendekatan pribadi dibandingkan instruksional	Pendekatan pembelajaran menekankan pada pendekatan pribadi untuk pengembangan watak dan karakter kemandirian serta sikap kewirausahaan namun tetap mempedulikan pencapaian standar kompetensi lulusan
		Lebih menekankan pada penuntasan penyampaian materi dan mengabaikan kebutuhan pribadi warga belajar	Senantiasa mempedulikan karakteristik dan kebutuhan warga belajar pada saat penyampaian materi pelajaran	Karakteristik dan kebutuhan warga belajar dijadikan landasan dalam pengembangan pembelajaran sehingga tercipta

No	Program Paket B	Kondisi Awal	Kebutuhan Belajar Berdasarkan Analisis Keterampilan Fungsional	Aspek Pengembangan
				kemandirian dalam belajar
	Tujuan Pembelajaran	Tujuan Pembelajaran pada tahap awal hanya mengacu pada kemampuan WB agar bisa lulus dalam ujian paket B dan mereka mempunyai ijazah	Tujuan belajar lebih diarahkan pada pengembangan watak dan karakter kemandirian serta sikap kewirausahaan namun tetap mempedulikan pencapaian standar kompetensi lulusan	Tujuan pembelajaran tidak hanya menekankan pada pencapaian standar kompetensi lulusan namun lebih mengarah pada pengembangan watak dan karakter kemandirian serta sikap kewirausahaan
4.	Media Belajar	Minimnya media pendukung pembelajaran yang disusun oleh tutor pada setiap proses pembelajaran	Media belajar dapat membantu peningkatan kemampuan dan pemahaman WB	Tutor diharapkan dapat membuat media yang sederhana, murah, menarik dan memberi manfaat terhadap peningkatan kemampuan WB.
		Kurang memanfaatkan media lokal untuk mendukung proses belajar	Media belajar yang dibutuhkan pada hakekatnya tidak harus mahal, namun disekitar lingkungan WB pun dapat dijadikan media pembelajaran, asalkan sesuai dengan isi dan tujuan pembelajaran.	Tutor mengembangkan dan mencari media lokal baik dengan menggunakan objek nyata ataupun dengan cara visualisasi
5	Bahan Belajar	Belum adanya bahan belajar untuk mengembangkan watak dan karakter kemandirian serta sikap kewirausahaan yang disusun oleh pihak tutor/secara lokal ataupun nasional	Bahan belajar yang secara khusus mengarah pada pengembangan watak dan karakter kemandirian serta sikap kewirausahaan	Dikembangkan berbagai bahan belajar keterampilan fungsional yang secara khusus menekankan pada pengembangan watak dan karakter kemandirian serta sikap kewirausahaan
		Bahan belajar yang dikembangkan masih bersifat konvensional	Bahan belajar yang selama ini diberikan oleh tutor masih bersifat konvensional dan terkesan dipaksakan, aspek pengembangan watak dan karakter kemandirian serta sikap kewirausahaan masih terabaikan	Bahan belajar perlu dikembangkan dan disesuaikan dengan kebutuhan WB. Tutor dapat menyusun bahan belajar yang lebih mengarah pada aspek pengembangan

No	Program Paket B	Kondisi Awal	Kebutuhan Belajar Berdasarkan Analisis Keterampilan Fungsional	Aspek Pengembangan
				watak dan karakter kemandirian serta sikap kewirausahaan
6.	Kurikulum	Kemampuan tutor untuk menterjemahkan kurikulum dalam praktik pembelajaran masih sangat kurang dan beragam	Kurangnya kemampuan tutor untuk menterjemahkan kurikulum dalam praktik pembelajaran terjadi karena kurangnya pembinaan/bimbingan dari pihak terkait atau karena faktor kemalasan dari tutor itu sendiri.	Tutor dapat mengembangkan analisis terhadap kebutuhan belajar WB sehingga dapat dilanjutkan pada penyusunan kurikulum pembelajaran yang generik, namun mengacu pada pencapaian standar kemampuan WB.
		Kurikulum yang ada belum menyentuh pengembangan watak dan karakter kemandirian serta sikap kewirausahaan warga belajar sehingga lulusan program kurang memiliki kemandirian	Dalam kurikulum perlu adanya suplemen pengembangan watak dan karakter kemandirian serta sikap kewirausahaan warga belajar sehingga lulusan program memiliki kemandirian baik dalam belajar maupun dalam berusaha	Dikembangkan materi khusus sebagai suplemen kurikulum yang ada berupa materi keterampilan fungsional yang ditujukan untuk karakter kemandirian serta sikap kewirausahaan warga belajar
7.	Alat Evaluasi	Evaluasi yang telah disusun oleh Dinas dan lembaga terkait masih terbatas pada uji kemampuan penguasaan kompetensi akademik sehingga belum memberikan informasi tentang kemandirian warga belajar	Materi evaluasi selain mengukur kompetensi akademik juga perlu mengungkap watak dan karakter kemandirian serta sikap kewirausahaan warga belajar	Mengembangkan alat pengungkap watak dan karakter kemandirian serta sikap kewirausahaan warga belajar yang memenuhi alat ukur standar.

Dalam pelaksanaan program pendidikan kesetaraan di lapangan menyangkut tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi. Uji coba

dalam rangka menguji efektivitas model dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut.

Tahap Persiapan, kegiatan yang dilakukan yaitu: (1) menyusun program pelatihan tutor, merekrut dan melatih calon tutor, (2) menyusun program pendidikan keterampilan fungsional; (3) menentukan kelompok sasaran, (4) mengidentifikasi kelompok sasaran, (5) mempelajari data tentang kelompok sasaran, (6) menentukan prioritas kebutuhan dan masalah, (7) menyusun materi, (8) memilih dan menentukan metode, (9) menyiapkan media belajar; (10) menyiapkan daftar sasaran, (11) menentukan waktu dan tempat.

Tahap Pelaksanaan. Melakukan pengamatan selama proses pembelajaran secara berkelanjutan, mencatat hal-hal yang terjadi baik yang menyangkut tutor maupun, motivasi, kreativitas dari warga belajar dalam mengikuti pembelajaran. Untuk melihat keterpaduan dan keterkaitan antarkomponen yang satu dengan komponen lainnya dan efektif tidaknya program yang telah dipersiapkan sebelumnya, bisa membandingkan kriteria yang telah disusun dengan realitas yang terjadi selama proses ini berlangsung. Jika program ini bisa mencapai tujuan yang telah ditetapkan, berarti terjadi sinergi antara komponen-komponen tersebut, maka proses pembelajaran keterampilan fungsional bisa menyentuh dan memiliki ikatan emosional di antara warga belajar sehingga lebih familiar dan memiliki daya ungkit dalam pembelajaran.

Tahap Evaluasi, dalam proses pembelajaran, hasil penilaian dapat menolong tutor untuk memperbaiki keterampilan profesional tutor dan juga membantu mereka mendapat fasilitas serta sumber belajar yang lebih baik.

Merancang evaluasi termasuk tugas seorang tutor ketika dalam membuat rancangan pembelajaran (*instructional design*). Evaluasi adalah suatu proses berkelanjutan tentang pengumpulan dan penafsiran informasi untuk menilai (*assess*) keputusan-keputusan yang dibuat dalam merancang sebuah sistem pembelajaran. Hasil penilaian ini sebagai *feed back* terhadap program pendidikan keterampilan fungsional secara keseluruhan. Atas dasar ketercapaian tujuan program ini yang terakumulasi dalam hasil penilaian, bisa dilihat apakah program ini efektif atau tidaknya manakala dikomparasikan capaian kelompok eksperimen dengan kelompok kontrol. Kegiatan yang dilakukan dalam tahap evaluasi yaitu: menetapkan tujuan evaluasi, menyusun instrumen evaluasi, mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data, menggunakan hasil evaluasi.

Setelah melalui proses penghalusan, model pendidikan keterampilan fungsional itu diuji keefektivannya dalam meningkatkan kemandirian warga belajar. Keefektivan model pendidikan keterampilan fungsional itu diuji keefektivannya dalam meningkatkan kemandirian warga belajar dengan cara membandingkan rata-rata kesenjangan skor *pre test* dan *post test* pada kelompok eksperimen dengan kelompok kontrol.

Untuk menguji efektivitas model dilakukan melalui uji hipotesis yang datanya diperoleh melalui penelitian eksperimen. Bentuk perlakuan terhadap kelompok eksperimen adalah berupa penerapan model pendidikan keterampilan fungsional dilakukan selama enam bulan, yang terdiri atas persiapan satu bulan, pelaksanaan empat bulan, dan evaluasi serta tindak lanjut selama satu bulan.

Dalam penelitian ini dirumuskan satu hipotesis penelitian, dengan komparasi untuk menguji efektivitas model. Sebagaimana telah dirumuskan sebelumnya dalam Bab I, hipotesis penelitian yang dimaksud adalah sebagai berikut: “Terdapat perbedaan kemandirian yang signifikan antara kelompok warga belajar Pendidikan Kesetaraan Program Paket B yang menggunakan model pembelajaran keterampilan fungsional dengan yang tidak menggunakan model pembelajaran keterampilan fungsional”.

Dalam rumusan hipotesis tersebut, kemandirian kelompok warga belajar Pendidikan Kesetaraan Program Paket B yang menggunakan model pembelajaran keterampilan fungsional diperlakukan sebagai kelompok ke-1 (eksperimen). Sedangkan kemandirian kelompok warga belajar Pendidikan Kesetaraan Program Paket B yang tidak menggunakan model pembelajaran keterampilan fungsional diperlakukan sebagai kelompok ke-2 (kontrol).

Untuk keperluan pengujian, hipotesis penelitian tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam hipotesis statistik sebagai berikut:

$$H_0: \mu_1 = \mu_2$$

$$H_1: \mu_1 > \mu_2$$

Kriteria pengujiannya, H_0 ditolak jika: harga *p-value* untuk koefisien *t* yang diperoleh berdasarkan data empirik, lebih kecil dari α . Dalam penelitian ini, harga α ditetapkan sebesar 0,05.

Hasil analisis data menunjukkan bahwa kemandirian kelompok warga belajar Pendidikan Kesetaraan Program Paket B yang menggunakan model pembelajaran keterampilan fungsional (kelompok eksperimen) untuk $n = 48$ kelompok warga belajar Pendidikan Kesetaraan Program Paket B yang tidak

menggunakan model pembelajaran keterampilan fungsional (kelompok kontrol) untuk $n = 42$ diperoleh harga-harga statistik sebagai berikut.

Kelompok Skor	KelompokEksperimen		Kelompok Kontrol	
	Rata-rata	Simpangan Baku	Rata-rata	Simpangan Baku
Pre Test	136,46	26,131	140,76	43,634
Post Test	217,88	29,740	154,24	40,182
Gain	81,42	10,198	30,21	46,750

Untuk kepentingan uji efektivitas model, yang dipertimbangkan adalah skor *gain*. Hasil uji homogenitas varians menghasilkan harga F sebesar 0,810 dengan $p = 0,371$. Dengan demikian varians kedua kelompok tersebut homogen. Sementara itu, hasil uji perbedaan rata-rata menunjukkan harga $t = 8,607$ dan harga $p = 0,000$. Tampak bahwa harga p jauh lebih kecil dari 0,05 sehingga perbedaan tersebut secara statistik signifikan. Rata-rata kemandirian kelompok warga belajar Pendidikan Kesetaraan Program Paket B yang menggunakan model pembelajaran keterampilan fungsional (eksperimen) lebih tinggi dibanding rata-rata kemandirian kelompok warga belajar Pendidikan Kesetaraan Program Paket B yang tidak menggunakan model pembelajaran keterampilan fungsional (kontrol). Selisih kedua rata-rata tersebut adalah sebesar 63,637.

Apa yang ditemukan dalam penelitian ini sesuai dengan rumusan hipotesis yang dikemukakan dalam penelitian. Dengan demikian, Terdapat perbedaan kemandirian yang signifikan antara kelompok warga belajar Pendidikan Kesetaraan Program Paket B yang menggunakan model pembelajaran keterampilan fungsional dengan yang tidak menggunakan model pembelajaran keterampilan fungsional. Kemandirian kelompok warga belajar Pendidikan

Kesetaraan Program Paket B yang menggunakan model pembelajaran keterampilan fungsional lebih tinggi dibandingkan dengan yang tidak menggunakan model pembelajaran keterampilan fungsional. Jadi hipotesis yang dirumuskan dalam penelitian ini diterima.

Dari hasil uji hipotesis itu dapat diungkapkan bahwa model pembelajaran keterampilan fungsional yang dikembangkan dalam penelitian ini, secara empirik dapat meningkatkan kemandirian warga belajar Pendidikan Kesetaraan Program Paket B.

D. Pembahasan Hasil Penelitian

Sesuai dengan permasalahan dan hasil penelitian yang telah dikemukakan dalam uraian sebelumnya, pembahasan hasil penelitian ini diarahkan pada tiga hal, yaitu: (1) pembahasan tentang kondisi objektif pelaksanaan pembelajaran keterampilan fungsional dalam Pendidikan Kesetaraan Program Paket B pada PKBM di Purwakarta, (2) pembahasan tentang model pembelajaran keterampilan fungsional, (3) pembahasan tentang efektivitas model pembelajaran keterampilan fungsional dalam peningkatan kemandirian warga belajar Pendidikan Kesetaraan Program Paket B.

1. Pembahasan tentang Kondisi Objektif Pelaksanaan Pembelajaran Keterampilan Fungsional dalam Pendidikan Kesetaraan Program Paket B pada PKBM di Kabupaten Purwakarta

Dalam penelitian ini ditemukan bahwa warga belajar pendidikan kesetaraan Program Paket B di PKBM Kabupaten Purwakarta sebagian besar berusia 13-22 tahun (90%). Ini berarti bahwa sebagian besar dari mereka merupakan prioritas I dan II pendidikan kesetaraan Program Paket B (Direktorat

Pendidikan Kesetaraan, 2006). Penggarapan warga belajar usia 13-15 tahun untuk dilibatkan dalam pendidikan kesetaraan Program Paket B di PKBM, mengandung arti bahwa PKBM Kabupaten Purwakarta memiliki andil penting dalam rangka penuntasan wajar Dikdas sembilan tahun di Purwakarta khususnya dan Indonesia umumnya. Adanya warga belajar Program Paket B yang berusia di atas 22 tahun, mengindikasikan bahwa ada sebagian masyarakat yang belum memiliki ijazah SMP atau sederajat, ingin meningkatkan kualitas pendidikannya. Kondisi ini perlu dikembangkan karena tumbuhnya kesadaran internal dari masyarakat untuk berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan merupakan peluang bagi keberhasilan program yang pada gilirannya akan memberikan sumbangan berarti bagi upaya pengembangan kualitas SDM.

Hasil penelitian ditemukan informasi bahwa berdasarkan jenis kelaminnya, warga belajar laki-laki berjumlah 42,67% dan perempuan sebanyak 57,33%. Ini mengandung arti bahwa latar belakang pendidikan penduduk laki-laki di Purwakarta relatif lebih tinggi dibanding perempuan. Selain itu, data ini juga mengandung arti bahwa penduduk perempuan yang belum memiliki ijazah SMP/sederajat lebih banyak yang ingin meningkatkan pendidikannya dibanding penduduk laki-laki.

Kajian ini mengungkap bahwa sebagian besar warga belajar belum kawin (62,67%). Ini mengindikasikan bahwa usia mereka merupakan prioritas I Pendidikan Kesetaraan Paket B. Di lain pihak, setelah lulus mereka sebagian besar memiliki peluang untuk melanjutkan ke SMA/SMK di samping Paket C.

Berdasarkan hasil penelitian, sebagian besar belum bekerja (93%). Hanya 7% yang sudah bekerja, itu pun dalam sektor informal. Besarnya persentase warga belajar yang belum bekerja mengandung arti bahwa Pendidikan Kesetaraan Program Paket B mereka gunakan sebagai jalan untuk memperoleh pekerjaan disamping untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi. Hal ini dapat dimaklumi karena di Purwakarta itu terdapat sejumlah perusahaan. Perusahaan-perusahaan itu mensyaratkan minimal lulusan SMP dalam merekrut pegawainya. Tuntutan ini ditenggarai menjadi pemicu bagi masyarakat Purwakarta yang belum memiliki ijazah SMP karena berbagai keterbatasan terutama masalah ekonomi, untuk mengikuti Pendidikan Kesetaraan Program Paket B.

Studi inipun membahas bahwa jarak tempat tinggal warga belajar dari PKBM umumnya 2 km atau lebih, bahkan beberapa di antaranya harus ditempuh dengan cara berjalan kaki. Kondisi ini telah menjadi masalah tersendiri bagi kelancaran pelaksanaan program. Warga belajar banyak yang absen karena alasan tidak punya ongkos, cuaca hujan, panas, atau cape. Hal ini pun dikeluhkan oleh para penyelenggara program.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tujuan yang memotivasi mereka menjadi warga belajar di PKBM umumnya adalah memperoleh sertifikat/ijazah (92,50%). Hal ini sejalan dengan temuan sebelumnya dalam penelitian ini bahwa sebagian besar warga belajar usianya relatif muda dan belum bekerja. Ijazah yang mereka peroleh boleh jadi akan dijadikan bekal untuk memasuki kerja, misalnya menjadi karyawan pabrik.

a. Tenaga Pendidik (Tutor)

Dalam penelitian ini ditemukan informasi bahwa sebagian besar (60%) tutor adalah laki-laki dan perempuan hanya (40%). Proporsi ini mengindikasikan bahwa partisipasi laki-laki dan perempuan untuk menjadi tutor pendidikan kesetaraan paket B relatifimbang. Usia sumber belajar/tutor berentang dari 21 tahun sampai 56 tahun, dengan rata-rata 34 tahun, cukup matang bagi pendidik kesetaraan Paket B.

Didapat pula informasi bahwa sebagian besar (86%) tutor sudah menikah dan memiliki pekerjaan selain sebagai tutor (85%). Kondisi ini sangat menguntungkan karena selain tutor akan relatif lama menetap di tempat saat ini dan mereka pun akan bertahan menjadi tutor karena mereka memiliki pekerjaan selain sebagai tutor. Pekerjaan sebagai tutor merupakan wujud pengabdian dan aktualisasi diri mereka. Namun sangat disayangkan, kendati sebagian besar dari mereka pernah mengikuti mengikuti PNF kewirausahaan, kursus dan pelatihan. Namun secara formal, latar belakang pendidikan tutor (92%) adalah paling tinggi SMA dan sederajat. Hanya 8% tutor yang lulusan perguruan tinggi. Hal ini masih di bawah standar yang diharapkan bahwa tenaga pendidik nonformal untuk Paket B minimal D2 (Direktorat Pendidikan Kesetaraan, 2007).

Penelitian ini juga menghasilkan temuan bahwa penghasilan tutor sebelum menjadi tutor adalah minimum Rp. 200.000 dan maksimum adalah Rp. 2.300.000 dengan penghasilan rata-rata Rp.540.000. Setelah menjadi tutor penghasilan berubah minimum Rp. 250.000 maksimum Rp. 2.300.000 dengan rata-rata Rp. 750.000. Temuan ini mengindikasikan bahwa penghasilan tambahan sebagai tutor belum memberikan perubahan yang berarti bagi penghasilan tutor secara

keseluruhan. Ini dapat dipahami karena honor yang diterima tutor tidak menentu baik dilihat dari segi waktu pembayaran maupun jumlahnya.

Studi ini menghasilkan pengalaman para tutor menjadi sumber belajar bervariasi dari yang kurang dari 1 tahun sampai yang lebih dari 3 tahun. Rata-rata pengalaman mereka menjadi adalah di atas 2 tahun. Ini memberi makna bahwa keterlibatan mereka sebagai tutor pendidikan kesetaraan Paket B masih relatif baru. Mereka masih perlu mendalami berbagai hal tentang pendidikan kesetaraan, terutama berkaitan dengan pendekatan pembelajaran nonformal. Hal yang mengkhawatirkan juga bisa muncul manakala mereka sebelumnya bukan seorang pendidik atau belum pernah terlibat dalam aktivitas pendidikan. Kendati demikian kekhawatiran itu tidak perlu terlalu jauh karena dalam pemilihan tutor dasar pendidikan formal benar-benar diperhatikan, tidak asal pilih.

Hasil kajian inipun diterima informasi bahwa jumlah tutor yang ada di tiap-tiap PKBM, baik menurut warga belajar maupun pengelola sudah dipandang sesuai dengan kebutuhan (95%), bahkan menurut (5%) responden dianggap melebihi kebutuhan. Temuan ini mengindikasikan bahwa secara kuantitas tutor PKBM itu sudah memadai, selanjutnya mereka perlu dikembangkan kualitas sehingga memenuhi standar minimal seorang tutor paket B.

Informasi lain dari penelitian ini adalah bahwa tujuan para tutor untuk menjadi tutor terlihat 7% untuk memperoleh pendapatan tambahan, 3% untuk meningkatkan kemampuan yang dimiliki, 5% untuk membantu warga yang kurang mampu, dan (85%) untuk melaksanakan tugas pemerintah. Temuan ini mengandung arti bahwa mereka terlibat dalam Pendidikan Kesetaraan paket B

karena melaksanakan tugas pemerintah dalam rangka mengentaskan Wajar Dikdas 9 tahun. Tujuan mereka adalah pengabdian, makanya wajar yang menjadi tujuan mereka menjadi tutor tidak berkaitan langsung dengan upaya memperoleh penghasilan sehingga penghasilan mereka tidak berubah secara berarti.

b. Strategi Pembelajaran

Kajian ini menghasilkan temuan bahwa pembelajaran pada PKBM, secara umum pengorganisasian warga belajar ditangani dan dikelola dalam suasana/setting kelompok belajar. Hal ini sudah sejalan dengan pedoman penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan. Setiap kelompok belajar berangotakan 20-25 orang warga belajar. Kelompok seperti ini cukup ideal untuk proses pembelajaran.

c. Tempat Kegiatan Belajar

Dalam kajian ini juga diperoleh informasi bahwa kondisi bangunan PKBM sebagai panti belajar sebagian besar permanen (56,67%), dengan rata-rata luas bangunan (panti) 188 m², dengan luas minimal 35 m² dan maksimal 960 m². Sarana prasarana belajar yang tersedia di PKBM sebagian besar terdiri dari buku/bahan belajar, dan lainnya berupa fasilitas belajar, perpustakaan, dan media belajar. Status kepemilikan panti belajar pada PKBM adalah menyatakan milik yayasan (60,00%), sewa (26,67), milik pengelola dan milik warga belajar (6,67 %). Kondisi seperti itu, dapat menjamin keberlangsungan pendidikan secara baik dan aman untuk jangka lama. Pihak pengelola hanya tinggal meningkatkan pemeliharaan dan penataan panti agar lebih sesuai dengan kebutuhan proses pembelajaran, terutama masalah kebersihan dan kenyamanan. Ini penting karena

pada saat penelitian diketahui bahwa kondisi panti yang ada saat ini umumnya kurang terpelihara kebersihan dan kenyamanannya.

d. Perencanaan dan Proses pembelajaran

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tujuan diselenggarakannya berbagai program di PKBM, menurut pengelola sebanyak 33,33% didasarkan pada pemenuhan akan keanekaragaman minat warga belajar, 20,00% pengelola menyatakan didasarkan kepada pemenuhan keanekaragaman kebutuhan warga belajar, (26,67%) pengelola menyatakan didasarkan pada keanekaragaman adat/kebiasaan masyarakat calon warga belajar, dan (20,00%) didasarkan kepada keanekaragaman tuntutan/kebutuhan pasar. Hal ini sudah sejalan dengan hakekat tujuan penyelenggaraan pendidikan kesetaraan yakni menyediakan layanan alternatif yang dapat memenuhi keanekaragaman kebutuhan masyarakat beserta berbagai permasalahan yang mengambat mereka menempuh pendidikan pada jalur formal.

Dalam studi ini juga diperoleh informasi bahwa waktu penyelenggaraan program pembelajaran di PKBM bervariasi. Menurut tutor PKBM, waktu pembelajaran pada umumnya merupakan hasil kesepakatan antara tutor dengan warga belajar (86,67%), diserahkan kepada tutor (6,67%), diserahkan kepada warga belajar (6,67%) dan disesuaikan dengan tempat (10%). Lamanya waktu pembelajaran per minggu pada PKBM, (73,33%) selama dua kali, dan (26,67%) selama satu kali. Keragaman ini tidak perlu dipermasalahkan, yang penting memenuhi standar minimal penyelenggaraan Paket B yakni 816 jam/tahun, 180 hari/tahun, 4,5 jam/hari, 34 minggu/tahun, dan 34 SKS/semester @ 40 menit

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana pembelajaran di PKBM bersumber dari pemerintah (86,67%). Sisanya ada yang dari masyarakat, forum PKBM, dan warga belajar. Ini dapat dipahami karena sebagian besar PKBM menyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Paket B karena ada dana bantuan dari pemerintah. Begitu juga sebagian besar warga belajar mengikuti Paket B karena mereka tidak perlu membayar. Jangankan untuk membayar sumbangan pendidikan, mereka pun sering bolos tidak mengikuti pembelajaran karena tidak punya ongkos. Kondisi ini sejalan dengan pembiayaan sebagaimana digariskan dalam Acuan dan Pembelajaran Pendidikan Kesetaraan (Direktorat Pendidikan Kesetaraan, 2007).

Hasil penelitian berkenaan dengan metode, alat dan sumber belajar menunjukkan bahwa metode pembelajaran yang sering digunakan di PKBM, menurut warga belajar adalah ceramah, tanya jawab, dan diskusi (80%). Metode praktek hanya sekitar 20%. Kendati demikian, metode pembelajaran yang digunakan itu, menurut warga belajar di PKBM sesuai dengan kondisi warga belajar (93,33%). Alat dan sumber pembelajaran yang digunakan di PKBM, pada umumnya kurang menunjang kemampuan warga belajar (66,67%). Apa yang terungkap dalam penelitian ini mengindikasikan bahwa metode yang digunakan masih bersifat konvensional. Hal ini belum sejalan dengan acuan yang disarankan Direktorat Pendidikan Kesetaraan (2007) bahwa pembelajaran hendaknya menekankan kegiatan yang berpusat pada peserta didik. Fokus pembelajaran adalah untuk mengoptimalkan penguasaan hasil pembelajaran secara tuntas. Kegiatan pembelajaran ini hendaknya dapat meningkatkan perolehan pengetahuan

dan keterampilan yang perlu dikuasai oleh peserta didik dalam menyelesaikan masalah atau membuat keputusan yang bijak. Untuk itu, metode yang dapat diterapkan adalah pembelajaran kooperatif, pembelajaran interaktif, pembelajaran dengan peta konsep, pembelajaran berbasis penugasan, eksperimen, diskusi, simulasi, dan kajian lapangan. Selain itu, alat dan sumber belajar yang ada masih perlu disesuaikan dengan keperluan pencapaian tujuan pembelajaran.

Menurut warga belajar PKBM, program pembelajaran disusun sesuai dengan kebutuhan warga belajar (54,67%), berdasarkan program pemerintah (38,67%), dan disusun sesuai dengan kemampuan tutor (6,67%). Proporsi ini sudah cukup baik, namun yang perlu diperhatikan adalah sejauhmana program pembelajaran itu disusun sehingga dapat memfasilitasi proses pembelajaran peserta didik.

e. Dana Belajar

Studi ini menunjukkan bahwa dana belajar yang dikelola atau yang digunakan di PKBM dan hasil pengolahan daftar isian, sumber dana belajar PKBM dapat diidentifikasi sebagai berikut: pemerintah, masyarakat, forum PKBM, Iuran warga Belajar, dan bantuan donator. Dari sumber-sumber dana tersebut, dana terbesar adalah dari pemerintah. Apa yang ditemukan dalam penelitian ini dapat dipahami karena biaya program Paket B bersumber dari pemerintah. Telah diungkapkan dalam uraian sebelumnya bahwa dana pembelajaran di PKBM bersumber dari pemerintah (86,67%). Sisanya ada yang dari masyarakat, forum PKBM, dan warga belajar. Kondisi ini sejalan dengan

pembiayaan sebagaimana digariskan dalam Acuan dan Pembelajaran Pendidikan Kesetaraan (Direktorat Pendidikan Kesetaraan, 2007).

f. Sarana Belajar

Kajian ini menunjukkan bahwa sebagian PKBM memiliki sarana belajar berupa gedung sebagai tempat belajar, buku-buku sebagai bahan belajar, berbagai media pembelajaran, dan perpustakaan. Sebagian lagi belum memiliki gedung tempat belajar sendiri. Tempat belajarnya masih numpang di sekolah-sekolah dasar atau tempat lain yang mereka sewa. Hal ini tidak menjadi masalah karena dalam Acuan dan Pembelajaran Pendidikan Kesetaraan (Direktorat Pendidikan Kesetaraan, 2007) juga kondisi seperti itu tidak dipersoalkan. Yang penting perlu dilengkapi oleh administrasi untuk menunjang kelancaran pengelolaan kelompok belajar..

g. Hasil Belajar

Dalam studi ini diperoleh informasi bahwa hasil belajar yang berupa pengetahuan, dinilai melalui tes hasil belajar tertulis, termasuk kualifikasi baik (61%), bahkan (23%) responden menyatakan sangat baik, dan (16%) responden menyatakan cukup baik. Hasil belajar yang diperoleh itu sesuai dengan kebutuhan dan tujuan mereka belajar. Dampak pembelajaran yang diperoleh dapat meningkatkan kemampuan dan keterampilan warga belajar. Temuan ini mengandung arti bahwa pembelajaran Paket B telah memenuhi standar dan juga memenuhi kebutuhan warga belajar. Dampaknya tidak hanya kepada pengetahuan tetapi juga pada kompetensi dan keterampilan warga belajar.

Berkenaan dengan faktor-faktor eksternal penyelenggaraan PKBM yang ditemukan dalam penelitian ini dibahas sebagai berikut.

h. Pembinaan

Dalam studi ini ditemukan informasi bahwa pembinaan pada penyelenggaraan PKBM dilakukan oleh penilik dan Tenaga Lapangan Dikmas (TLD) rata-rata 4 kali dalam setahun dengan teknik bimbingan individual, bimbingan kelompok, dan dengan penggunaan media. Materinya adalah PNF kesetaraan, pendidikan keaksaraan, kewirausahaan, pendidikan anak usia dini, kursus dan pelatihan, keagamaan, pelayanan informasi, dan pengelolaan PKBM. Apa yang ditemukan itu sudah cukup memadai, yang penting pembinaannya dilakukan secara merata dan berkesinambungan. Tampaknya materi pembinaan yang diberikan pun cukup komprehensif, dalam arti mencakup berbagai aktivitas yang menjadi bidang garapan PKBM, termasuk di dalamnya pendidikan kesetaraan.

i. Jaringan Informasi dan Kerja sama (Kemitraan) PKBM

Salah satu temuan penelitian ini ialah bahwa PKBM menjalin kemitraan dengan Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Tenaga Kerja, Kamar Dagang dan Industri (KADIN), Perbankan, Dunia Usaha/Dunia Industri, BPKB, SKB, Tokoh Masyarakat dan perguruan tinggi dalam pembinaan dan penyelenggaraan PKBM. Ini mengandung arti bahwa PKBM relatif cukup dikenal oleh instansi lain. Jejaring yang kini telah dibangun perlu dikembangkan dan dilestarikan agar berbagai aktivitas di PKBM diketahui dan dipahami oleh pihak-pihak terkait. Bahkan bagi perusahaan/dunia industri,

program kesetaraan dapat dijadikan lahan untuk digarap melalui program *corporate social responsibility* (CSR) perusahaan yang bersangkutan. Dengan cara ini, kedua belah pihak sama-sama diuntungkan, PKBM akan memperoleh bantuan program dan dananya, sementara perusahaan dapat mewujudkan tanggung jawab sosialnya secara nyata dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekitar. Bahkan perusahaan bisa mencangkokkan program bagi calon tenaga kerjanya sehingga lebih memenuhi kebutuhan perusahaan.

j. Dampak Program Pembelajaran

Dalam studi ini terdapat informasi bahwa dampak program pembelajaran yang paling dirasakan oleh warga belajar adalah berupa peluang kerja bagi warga belajar serta peningkatan kemampuan dan keterampilan. Temuan ini dapat dimaklumi karena dengan diraihnya ijazah Paket B berarti mereka mempunyai peluang untuk bekerja pada perusahaan-perusahaan yang ada di Purwakarta karena untuk diterima bekerja minimal harus lulusan SMP/Sederajat. Di samping itu, mereka juga memiliki pengetahuan dan keterampilan baru yang diajarkan.

Secara ringkas, temuan tentang pelaksanaan proses pembelajaran keterampilan fungsional pada pendidikan kesetaraan program Paket B di PKBM Kabupaten Purwakarta dapat dibahas sebagai berikut.

- 1) Warga belajar sebelumnya tidak mendapatkan pembelajaran secara konseptual tentang pendidikan kecakapan hidup, biasanya langsung luluh dengan praktek keterampilannya; kemampuan awal warga belajar dari konsep masih rendah; pengalaman warga belajar dalam bidang keterampilan berwirausaha belum tumbuh; minat dan kebutuhan belajar belum nampak.

- 2) Tutor belum memiliki pemahaman terhadap substansi materi pendidikan; cara mengajar tutor masih bersifat klasikal dan lebih dominan dalam setiap pelaksanaan pembelajaran; setiap pelaksanaan pembelajaran tutor belum terbiasa menyusun rencana pembelajaran, media belajar, dan alat evaluasi pembelajaran.
- 3) Proses pembelajaran lebih cenderung pada pendekatan instruksional dibandingkan pendekatan pribadi; lebih menekankan pada penuntasan penyampaian materi dan mengabaikan kebutuhan pribadi warga belajar
- 4) Tujuan pembelajaran pada tahap awal hanya mengacu pada kemampuan WB agar bisa lulus dalam ujian paket B dan mereka mempunyai ijazah
- 5) Minimnya media pendukung pembelajaran yang disusun oleh tutor pada setiap proses pembelajaran; kurang memanfaatkan media lokal untuk mendukung proses belajar
- 6) Belum adanya bahan belajar untuk mengembangkan watak dan karakter kemandirian serta sikap kewirausahaan yang disusun oleh pihak tutor/secara lokal ataupun nasional; bahan belajar yang dikembangkan masih bersifat konvensional
- 7) Kurikulum yang ada belum menyentuh pengembangan watak dan karakter kemandirian serta sikap kewirausahaan warga belajar sehingga lulusan program kurang memiliki kemandirian; kemampuan tutor untuk menterjemahkan kurikulum dalam praktik pembelajaran masih sangat kurang dan beragam

- 8) Evaluasi yang telah disusun oleh Dinas dan lembaga terkait masih terbatas pada uji kemampuan penguasaan kompetensi akademik sehingga belum memberikan informasi tentang kemandirian warga belajar

Tegasnya, proses pembelajaran seperti yang ditemukan dalam penelitian ini belum mampu menyediakan kondisi yang memfasilitasi warga belajar mengembangkan kemandiriannya secara optimal.

2. Pembahasan tentang Model Konseptual Pembelajaran Keterampilan Fungsional yang Dikembangkan

Pembahasan model konseptual pembelajaran keterampilan fungsional untuk peningkatan kemandirian warga belajar pendidikan kesetaraan program paket B di PKBM Al Salaam Kabupaten Purwakarta, dapat dideskripsikan sebagai berikut.

Dalam dasar pemikiran diungkapkan bahwa model pendidikan pembelajaran keterampilan fungsional untuk peningkatan kemandirian belajar warga belajar, bersandar pada landasan konseptual, landasan yuridis, landasan empirik. Hal ini amat penting karena suatu model selain harus memiliki pijakan teori yang kokoh dan didasarkan pengalaman empirik yang teruji, juga harus berada pada koridor dan rambu-rambu hukum yang memayunginya. Semua itu telah dipenuhi dalam pengembangan model pembelajaran keterampilan fungsional untuk peningkatn kemandirian warga belajar pendidikan kesetaraan program paket B di PKBM Al Salaam Kabupaten Purwakarta.

Landasan konseptual yang dijadikan pijakan dalam pengembangan model adalah education for all dan keterampilan fungsional (life skills) dan konsep kemandirian. Selain itu juga juga mengacu pada konsep dasar kecakapan hidup

(*life skills*), kecakapan hidup dalam pendidikan nonformal, hubungan kehidupan nyata, kecakapan hidup, dan mata pelajaran, pendidikan berbasis luas sebagai wahana pendidikan berorientasi kecakapan hidup, dan jenis-jenis *life skills*, pengembangan *life skills* dalam pendidikan berbasis masyarakat. Pemilihan landasan konseptual seperti itu sudah dipandang cukup mendasar dan komprehensif untuk pengembangan model pembelajaran keterampilan fungsional untuk peningkatan kemandirian warga belajar pendidikan kesetaraan program paket B di PKBM Al Salaam Kabupaten Purwakarta.

Berkenaan dengan landasan yuridis sebagai payung hukum dan kebijakan yang menjadi legalitas dan akuntabilitas pada tingkat implementasi model yang disusun, dalam penelitian ini dipilih UUD 1945, UU Nomor 20 tahun 2003 dan Inpres Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Wajar Dikdas 9 tahun dan Pemberantasan Buta Aksara dan Kepmen Diknas tentang pelaksanaan Gerakan Nasional Percepatan Wajar Dikdas 9 tahun dan Pemberantasan Buta Aksara. Model yang disusun telah disesuaikan dengan rambu-rambu yang ada dalam payung hukum tersebut. Dengan demikian, model yang dikembangkan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dalam penyelenggaraan pendidikan pada umumnya dan pendidikan kesetaraan program paket B pada khususnya.

Selain berlandaskan acuan konseptual dan yuridis, model pembelajaran keterampilan fungsional untuk peningkatan kemandirian warga belajar pendidikan kesetaraan program paket B di PKBM Al Salaam Kabupaten Purwakarta juga dilandaskan pada temuan empirik berupa hasil penelitian tahap

pendahuluan mengenai informasi atau data yang diperlukan dari masyarakat sekitar dan kelompok sasaran. Data kondisi riil pembelajaran ini sebagaimana diungkapkan dalam bagian awal hasil penelitian dijadikan pijakan dalam pengembangan model. Dengan demikian, model pembelajaran keterampilan fungsional untuk peningkatan kemandirian warga belajar pendidikan kesetaraan program paket B di PKBM Al Salaam Kabupaten Purwakarta selain kokoh secara konseptual dan yuridis juga memiliki fisibilitas dan adaptabilitas yang tinggi untuk diaplikasikan dalam praktik pembelajaran nyata di lapangan.

Tujuan umum Pembelajaran Pendidikan Kesetaraan Program Paket B adalah untuk memberikan pendidikan setara SMP/MTs agar dapat memiliki pengetahuan akademik dan penguasaan keterampilan praktis yang dapat dijadikan bekal untuk bekerja dan berusaha. Sedangkan secara khusus, tujuan pembelajaran program paket B adalah: (1) Membantu menurunkan jumlah putus jenjang SD/MI, *drop out* SMP/MTs; (2) Membelajarkan warga belajar agar memiliki pengetahuan keterampilan fungsional; berbasis keunggulan potensi lokal; (3) Melaksanakan pembelajaran fungsional program paket B berbasis keunggulan potensi lokal; (4) Memberdayakan PKBM untuk berpartisipasi membantu mengurangi jumlah putus jenjang SD/MI dan *drop out* SMP/MTs; (5) Meningkatkan kemampuan warga belajar membaca, agar mereka dapat memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari; (6) Memberdayakan tenaga lokal yang potensial untuk mengelola sumber daya yang ada di lingkungannya; (7) Meningkatkan kemandirian warga belajar melalui pembinaan watak kewirausahaan.

Tampak bahwa tujuan pembelajaran yang dirumuskan itu selain mencapai standar kompetensi lulusan juga menekankan kepada pembinaan mental dan watak kemandirian dan kewirausahaan. Dengan demikian, lulusan yang menggunakan model pembelajaran keterampilan fungsional untuk peningkatan kemandirian warga belajar pendidikan kesetaraan program paket B di PKBM Al Salaam Kabupaten Purwakarta lebih mandiri dibandingkan dengan lulusan Paket B lainnya.

Sasaran layanan pembelajaran fungsional program paket B adalah anggota masyarakat yang termasuk sasaran wajar dikdas 9 tahun kelompok umur 13-15 tahun. Dengan demikian, sasaran program ini adalah prioritas program. Dengan demikian, program ini memberikan andil yang berarti dalam penuntasan wajar Dikdas 9 tahun. Di lain sisi, lulusan yang menggunakan model pembelajaran keterampilan fungsional untuk peningkatan kemandirian warga belajar pendidikan kesetaraan program paket B di PKBM Al Salaam Kabupaten Purwakarta akan lebih mandiri dibandingkan lulusan paket B di PKBM lainnya.

Penyelenggaraan pembelajaran fungsional program paket B dikembangkan dengan menggunakan dua strategi, yaitu: (1) hanya mata pelajaran yang esensial saja yang diberikan, sedangkan mata pelajaran lainnya diharapkan dapat dipelajari oleh para warga belajar sendiri. Mata pelajaran yang diberikan adalah PPKn, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, IPA (Biologi, Fisika); dan (2) pembelajaran dilaksanakan dengan pola belajar mandiri, belajar kelompok, dan tutorial.

Kurikulum dikembangkan dalam model ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan meliputi: (1) Kelompok mata pelajaran Pendidikan Agama dan Akhlak Mulia; (2) Kelompok mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dan kepribadian; (3) Kelompok mata pelajaran Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; (4) Kelompok mata pelajaran Estetika; dan (5) Kelompok mata pelajaran Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan. Isi kurikulum tingkat satuan pendidikan meliputi 10 mata pelajaran yang keluasannya dan kedalamannya merupakan beban belajar bagi peserta didik pada satuan pendidikan. Ke-10 mata pelajaran tersebut meliputi: Pendidikan Agama; Pendidikan Kewarganegaraan; Bahasa; Matematika, Ilmu, Pengetahuan Alam, Ilmu Pengetahuan Sosial, Seni dan Budaya, Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan; Keterampilan/Kejuruan; Muatan Lokal. Selain itu, Kurikulum program Paket B setara SMP/MTs mengembangkan kecakapan hidup yang terdiri atas: kecakapan pribadi, kecakapan intelektual, kecakapan sosial dan kecakapan vokasional. Ini mengandung arti bahwa model yang dikembangkan menggunakan kurikulum yang sesuai dengan standar nasional sehingga memungkinkan setiap lulusan bisa lolos ujian nasional Paket B. Sebagai kekhasan model ini, dalam pembelajaran dimasukkan materi khusus untuk membina karakter kemandirian psikologis dan sikap mental kewirausahaan. Materi ini bersifat suplemen namun diberlakukan sama pentingnya dengan materi lain yang digariskan dalam kurikulum nasional. Dengan demikian, lulusan Paket B yang menggunakan model ini akan lebih mandiri dibanding lulusan Paket B yang menggunakan model pembelajaran lainnya.

Fasilitator atau tutor diangkat dari kalangan masyarakat di lingkungan warga belajar. Tutor terlebih dahulu dilatih agar memahami program pembelajaran keterampilan fungsional dan memiliki kemampuan dalam bidangnya. Mereka Paham akan metodologi dan strategi belajar, Mampu menyusun rencana pembelajaran, Memiliki motivasi untuk membelajarkan orang lain, Letak geografis dekat dengan kelompok belajar. Dengan demikian, tutor yang menerapkan model pembelajaran keterampilan fungsional untuk peningkatan kemandirian warga belajar pendidikan kesetaraan program paket B di PKBM Al Salaam Kabupaten Purwakarta lebih kompeten dibandingkan dengan yang lain, khususnya dalam membangun sikap mental dan karakter kemandirian warga belajar.

Metode pembelajaran dalam model pembelajaran keterampilan fungsional untuk peningkatan kemandirian warga belajar pendidikan kesetaraan program paket B di PKBM Al Salaam Kabupaten Purwakarta menggunakan metode pembelajaran partisipatif. Sedangkan teknik pembelajaran yang digunakan adalah kelompok kecil, curah pendapat, diskusi kelompok, simulasi, permainan, demonstrasi, kerja kelompok dan praktek. Dengan cara ini pembelajaran lebih bervariasi dan responsif terhadap keanekaragaman karakteristik dan kebutuhan warga belajar secara individual.

Bahan belajar yang dikembangkan berasal dari warga belajar sendiri, lingkungan dan pihak penyelenggara. Sumber dan bahan belajar yang digunakan antara lain: Buku, Gambar, Peta, Diagram, Alat simulasi hitung dan sumber lain.

Selain itu, bahan dan sumber belajar dapat pula dibuat dan dikembangkan bersama warga belajar. Sumber dan bahan belajar tersebut yaitu yang ditemukan dan ditentukan oleh warga belajar dengan memanfaatkan potensi lokal atau potensi alam yang ada di sekitar mereka. Dengan cara ini, pembelajaran menjadi lebih familiar dengan warga belajar. Semua media yang digunakan sudah mereka kenal dan digunakan dalam kehidupan keseharian mereka. Sehubungan itu, hambatan belajar dan miskonsepsi akan dapat diminimalisasikan.

Evaluasi dilakukan dengan menggunakan teknik portofolio selama program berjalan. Evaluasi dilakukan secara bertahap yang meliputi tes lisan dan tulisan baik uraian atau pilihan ganda, dan praktek. Tes ini dilakukan selama proses k dengan budaya mereka. Pada akhir program akan dilakukan tes kompetensi untuk mengukur kemampuan warga belajar selama proses pembelajaran. Selain itu, dalam model pembelajaran ini, pada awal semester dilakukan pengukuran kemandirian warga belajar sebagai *pretest* dan pada akhir semester juga dilakukan pengukuran ulang sebagai *post test*. Cara seperti ini sudah cukup komprehensif untuk menggambarkan kemampuan belajar warga belajar secara nyata dan lengkap.

Hal lain yang menarik untuk dibahas adalah pemberlakuan SKS untuk pelajaran keterampilan yang bobotnya menjadi 80 menit per SKS dan penambahan materi Mental Kewirausahaan yang ditekankan pada pembentukan karakter dan sikap yang membentuk kemandirian serta sikap kewirausahaan warga belajar. Kendati jam belajar menjadi bertambah namun hal ini penting sehingga dalam model ini diperlakukan substitusi dan bahkan padanan komponen

Pengembangan Diri sebagaimana digariskan dalam Struktur Kurikulum SMP/MTs yang dalam Struktur Kurikulum Paket B tidak ditemukan.

3. Pembahasan Efektivitas Model Pembelajaran Keterampilan Fungsional dalam Peningkatan Kemandirian Warga Belajar Pendidikan Kesetaraan Program Paket B

Hasil uji efektivitas model yang dilakukan melalui uji hipotesis menunjukkan terdapat perbedaan kemandirian yang signifikan antara kelompok warga belajar Pendidikan Kesetaraan Program Paket B yang menggunakan model pembelajaran keterampilan fungsional dengan yang tidak menggunakan model pembelajaran keterampilan fungsional. Kemandirian kelompok warga belajar Pendidikan Kesetaraan Program Paket B yang menggunakan model pembelajaran keterampilan fungsional lebih tinggi dibandingkan dengan yang tidak menggunakan model pembelajaran keterampilan fungsional. Jadi hipotesis yang dirumuskan dalam penelitian ini diterima. Dari hasil uji hipotesis itu dapat diungkapkan bahwa model pembelajaran keterampilan fungsional yang dikembangkan dalam penelitian ini, secara empirik dapat meningkatkan kemandirian warga belajar Pendidikan Kesetaraan Program Paket B.

Mengingat bahwa hipotesis penelitian itu pada dasarnya dirumuskan berdasarkan kajian teori dan hasil penelitian terdahulu yang relevan, maka apa yang ditemukan dalam penelitian ini sejalan dengan teori yang digunakan dalam penelitian ini serta mendukung hasil penelitian terdahulu. Dari hasil penelitian ini dapat dijelaskan bahwa kemandirian warga belajar paket B akan lebih meningkat apabila dibina melalui pembelajaran model pembelajaran keterampilan fungsional. Hasil belajar Paket B itu merupakan kecakapan hidup merupakan

refleksi kemampuan manusia dalam memberdayakan berbagai potensi diri agar dapat memanfaatkan berbagai sumber daya baik dalam dirinya maupun dari luar agar ia senantiasa terampil dalam menjalani kehidupannya.

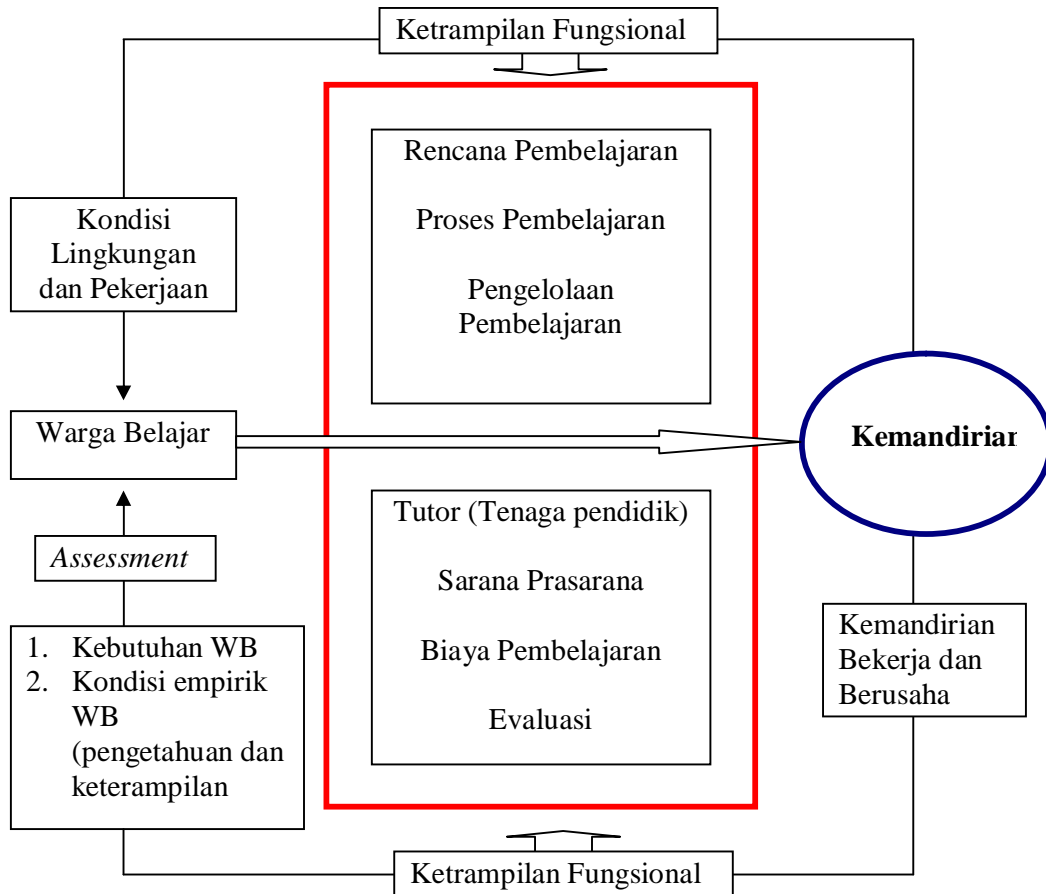
Kemandirian warga belajar itu mencakup kemandirian psikologis dan sikap mental kewirausahaan. Kemandirian psikologis diartikan sebagai kesiapan dan kemampuan warga belajar untuk melepaskan diri dari ikatan emosi dengan orang dewasa lain dalam mengatur, mengurus, dan menyelesaikan persoalan-persoalannya sendiri dan seberapa jauh kemampuan mereka dalam mengambil keputusan dan melaksanakannya melalui perbuatan atau tindakan nyata, serta kemampuan untuk melawan/menolak tekanan atau tuntutan orang lain berdasarkan prinsip benar dan salah, atau penting dan tidak penting. Makna kemandirian psikologis mencakup tiga aspek, yaitu kemandirian emosi (*emotional autonomy*), kemandirian bertindak atau berperilaku (*behavioral autonomy*) dan kemandirian nilai (*values autonomy*). Kemandirian emosi menunjuk pada aspek kemandirian yang berkaitan dengan kebebasan dari ketergantungan atau keterikatan hubungan emosional dengan orang dewasa lainnya. Subdimensi dan indikator kemandirian emosi sebagai berikut: (1) mampu membangun pandangan *de-idealized* terhadap orang tua/orang yang dituakan (tidak mengidealkan orang tuanya/orang yang dituakan); warga belajar tidak lagi melihat orang tua/orang yang dituakan mereka sebagai figur yang mengetahui segalanya (*all knowing*) atau menguasai segalanya (*all powerfull*), (2) mampu memandang orang tua/orang dewasa lainnya sebagaimana orang biasa pada umumnya (*parents as people*); warga belajar mampu melihat (kedudukan/fungsi dan peran) dan berinteraksi

dengan orang tua sebagaimana orang lain pada umumnya dan bukan hanya sebagai orang tua mereka, (3) *nondependency* (ketidaktergantungan); warga belajar memiliki tingkat kemampuan untuk lebih bersandar pada kekuatan diri sendiri daripada bergantung pada bantuan orang tua/orang dewasa lain ketika mereka mengalami ketakutan, kebingungan, atau kesedihan, dan (4) *individuated* (berdiri sendiri); warga belajar merasa berdiri sendiri dalam berhubungan dengan orang tua mereka; siswa memiliki kehidupan pribadi yang tidak selalu harus diketahui oleh orang tua/orang dewasa lainnya. Kemandirian perilaku menunjuk pada kemampuan untuk membuat keputusan-keputusan secara bebas dan menindaklanjuti sendiri keputusan keputusan tersebut tanpa terlalu bergantung pada bantuan/bimbingan orang lain. Subdimensi dan indikator dari kemandirian perilaku adalah sebagai berikut: (1) kemampuan mengambil keputusan (*decision making abilities*): warga belajar mampu berpikir hipotetis dalam membuat keputusan sendiri dan mengetahui secara tepat kapan harus meminta saran atau pendapat orang lain, (2) keteguhan terhadap pengaruh pihak lain (*conformity and susceptibility to influence*): warga belajar memiliki keteguhan dalam pendirian dan bersikap terhadap pengaruh dan tekanan dari orang lain, dan (3) kepercayaan diri (*self-reliance*): warga belajar mampu membuat keputusan dengan mengandalkan kepercayaan pada diri mereka sendiri. **Kemandirian nilai** menunjuk pada kemampuan untuk melawan/menolak tekanan-tekanan atau tuntutan-tuntutan orang lain; dalam arti, memiliki seperangkat prinsip tentang benar dan salah, tentang penting atau tidak penting. Subdimensi dan indikatornya mencakup hal-hal berikut: (1) *abstract belief*: warga belajar memiliki keyakinan-

keyakinan yang lebih jauh dan mendalam terhadap segala sesuatu, (2) *principled belief*: Warga belajar memiliki keyakinan-keyakinan yang semakin berakar pada prinsip-prinsip umum yang memiliki dasar ideologi, (3) *independent belief*: Warga belajar memiliki keyakinan-keyakinan yang tertanam atas kesadaran dan nilai-nilai yang mereka miliki sendiri tanpa pengaruh dari figur otoritas.

Selain apa yang dipaparkan di atas, efektivitas Model Pembelajaran Keterampilan Fungsional ini juga dapat dilihat dari dampak model terhadap *output* dan *outcome* program Paket B yang dijadikan kelompok eksperimen atau yang pembelajarannya menggunakan model Model Pembelajaran Keterampilan Fungsional. Berdasarkan hasil pengamatan, wawancara, dan penelusuran lulusan, di PKBM Al-Salaam, dari 48 orang warga belajar semuanya lulus dalam ujian nasional. Di antara mereka itu, 12 orang melanjutkan ke SMK, bekerja di pabrik sebanyak 10 orang, bekerja mandiri sebanyak 14 orang, dan 12 orang bekerja di berbagai sektor di Jakarta.

Sementara itu, warga belajar pada kelompok kontrol, yaitu di PKBM Citra, dari 42 orang warga belajar 5 orang di antaranya tidak lulus ujian nasional. Di antara mereka yang lulus, hanya 8 orang yang melanjutkan ke SMK sedangkan yang lainnya belum bekerja baik dengan cara membuka usaha sendiri maupun bekerja pada perusahaan milik orang lain.



Gambar. 4.7. Model Akhir Pembelajaran Keterampilan Fungsional